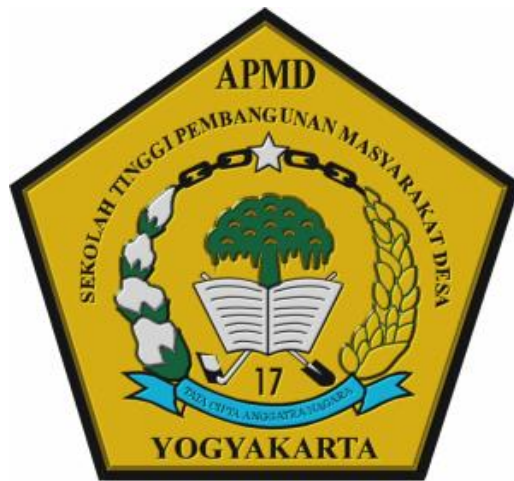


SKRIPSI

PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN

*(Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kota Yogyakarta)*



DISUSUN OLEH:

**ARIF SORU IBIDAWI
21520010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN JUDUL

**PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Serjana Pendidikan Strata Satu (SI)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Juli 2025

Waktu : 09:30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, M.A.
Penguji Samping I

Dr. Supardal, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Gregorius Sahdan, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Soru Ibidawi

Nim : 21520010

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Membentuk Pemerintahan (Studi di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta)”** merupakan benar-benar karya tulis saya yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2025

Yang menyatakan,



Arif Soru Ibidawi
21520010

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKDEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Arif Soru Ibidawi

NIM : 21520010

Telp : 085232341776

Email : -

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan izin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Membentuk Pemerintahan (Studi di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta)"

Izin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right).

Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk akibat hukum di kemudian hari apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Yogyakarta, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Arif Soru Ibidawi
21520010

HALAMAN MOTTO

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur”

(Filipi 4:6)

“ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan si tukang batu mengayunkan martil ke sebongkahan batu cadas, mungkin sampai seratus kali, tanpa menghasilkan satu retakan pun pada batu cadas itu. Namun pada hantaman yang ke seratus satu kali batu itu terbelah menjadi dua, dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya”

(Jacob Riis)

“Nyuawa lekada luburami, lekada paringu mahireya namapu, mapamingu natu ta tanah djawa memanyeranya napengu hakuduk”

(Tau Luburami)

“Di dalam perjuangan itu tidak ada yang sis-sia”

(Ir. Seokarno)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa limpa terimakasih, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sudah melindungi saya dan menyertai saya dalam setiap napas kehidupan .
2. Kepada Almarhum kedua orang tau saya tercinta, Bapak Umbu Paji Sipul dan Ibu Lusia Rambu Lawu Nedi. Terimakasih telah menghadirkan saya di dunia ini.
3. Kepada Nenek tercinta saya. Rambu Mora Siala, yang telah merawat dan membesarkan saya di masa-masa yang sulit pada saat itu sembah sujud cucumu berlimpa terimakasih.
4. Kepada kedua orang tau bea saya , Bapak Umbu Riada Todu dan Ibu Gega Rambu. Yang telah mereawat kami saya mengucapkan limpa teriamaksih
5. Suadara tecinta, Markus Laiya Sobang, David Nusa, Reni Rambu, Olvia Rambu, Umbu Sadewa, Erni Rambu, Imelda Rambu, Nobet Rambu, Yonatan. Terimakasih atas segala dukungan, motifasi, dan perjuanga serta doanya.
6. Om dan Tante Tercinta, Umbu Luju Pira Dawa dan Rambu Dada Siala (Alm). Terimaksih.
7. Keluarga besar manulusua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Yang selalu memberikan support dan kasih sayang kepada saya dalam berproses salama ini terimakasih atas semuanya.
8. Organisasi dan rumah besar dimana saya berdinamika dengan moto “pejuang pemikir-pemikir pejuang’ adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk teman-teman GMNI, Bung Ancik Dan Bung Yepsi (Pimpinan Komisariat) Bung Markus, Bung James, Bung Jekson, Bung Jose, Sarinah Auliia, Sarinah Lea, Sarinah Widia, Sarinah Diana, Bung Amah, Bung Hendra, Bung Lensa, Bung Angga, Bung Haris, Bung Ikard, Bung J Lado, Bung Sandy, Bung Simson, Sarinah Reta, Sarinah Sindy, Sarinah Itin, Sarinah Ari, Bung Erlan, Bung Muis, Bung Audio,

Bung Rhinus, Sarinah Kirana Bung Julham, Bung Bima, Sarina Tika, Sarinah Maya, Sarinah yosa, Bung Hendro, Bung Joe, Sarinah Ayu, Bung Ferdi, Sarinah Reni, Sarinah Irah, Sarinah Fafa, Sarinah Marlis, Bung Verlin, Bung Velix, Bung Irfan, Bung Filipus, Bung Patris, Sarinah Itha, Sarinah Rika, Sarinah Nursamsia, Bung Taufik, Bung Paul, Bung Urwai, Bung Oris, Sarinah Litansia, Sarinah Mumun, Bung Ferdinan, Bung Alex. Terimakasih atas dinamika dan ruang belajarnya selama ini. Merdeka. GMNI.....Jaya. Marhaen..... Menang,

9. Terimakasih untuk Mba Aulia Nurfach Lanteo yang sudah membantu dan mendukung saya dalam pengerjaan Skripsi sampai pada titik ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena penulis merasa yang terjadi dalam kehidupan ini semua karena kekuatan dari Tuhan, segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi dengan skripsi yang berjudul “PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana Strata satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Gregorius Sahdan, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang sudah bersedia membimbing dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi sebagai tugas akhir baik dorongan pemikiran, pengetahuan dan ide, atau gagasan yang didapatkan untuk mendukung selesainya skripsi tersebut.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melayani dan mendidik selama penulis menimba ilmu dikampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, yang telah bersedia membantu dan mempermudah saya melakukan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Kepada seluruh narasumber, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Kader PDI Perjuangan dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Yang sudah membantu dan memperlancar untuk menggali dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Almarhum kedua orang tua saya Bapak Umbu Paji Sipul dan Ibu Lusia Rambu Lawu Nedi. Terimakasih telah menghadirkan saya di dunia ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan masukan untuk perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik itu para akademisi, praktisi dan seluruh elemen masyarakat.

Yogyakarta, Agustus 2025
Penulis

Arif Soru Ibadawi
21520010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKDEMIK.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	11
F. Literatur Reviw.....	12
G. Kerangka Konsep	23
1. Partai Politik	23
2. Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.....	25
3. Partai sebagai Pembentuk Pemerintahan	27
H. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Objek Penelitian.....	30
3. Lokasi Penelitian.....	30
4. Subjek Penelitain	30

5. Teknis Pengumpulan Data	32
6. Teknik Analisis Data	33
BAB II PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN	36
A. Proses Membentuk Pemerintahan	36
1. Visi dan Misi PDI Perjuangan	40
2. Ideologi PDI Perjuangan	45
3. Dinamika Politik PDI Perjuangan	46
4. Azas PDI Perjuangan	47
5. Tujuan PDI Perjuangan	47
6. Dasar Prasyarat PDI Perjuangan	49
7. Kepemimpinan PDI Perjuangan	51
8. Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan	52
B. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan	56
1. Lokasi	56
2. Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta	56
3. Tugas Pokok Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta	
57	
4. Pemilu Legislatif di Kota Yogyakarta Tahun 2024	58
5. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024-2029	59
BAB III PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN	61
A. Penyajian Data dan Analisis	61
1. Struktural dan Fungsi Pelembagaan PDI Perjuangan Dalam Membentuk Pemerintahan	62
2. Nilai dan Norma Pelembagaan PDI Perjuangan dalam Membentuk Pemerintahan	69
3. Manajemen Organisasi PDI Perjuangan dalam Pembentuk Pemerintahan	76

BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Profil Subjek Penelitian.....	31
Tabel 2. 2	DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta	57
Tabel 2. 3	Sebaran Dapil dan Nama-nama Caleg PDIP Kota Yogyakarta Periode 2024-2029	59
Tabel 2. 4	Hasil Perbandingan Pemilihan Legislatif Tahun 2024-2029	60
Tabel 2. 5	Nama-nama Caleg yang menjadi DPRD dari PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Periode 2024-2029.....	60

INTISARI

Skripsi ini membahas tentang Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Membentuk Pemerintahan di DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan yang dilakukan di DPC Kota Yogyakarta, oleh karena itu terdapat beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelembagaan partai dalam membentuk pemerintahan. *Pertama*, proses kaderisasi yang masih dominan dilakukan oleh DPP sehingga DPC belum maksimal melaksanakan fungsinya. *Kedua*, banyaknya kader di PDI Perjuangan yang mendapatkan rekomendasi secara instan tanpa melalui pengkaderan. *Ketiga*, dalam proses kaderisasi pemahaman akan nilai ideologi dan tujuan partai yang seringkali diabaikan oleh kader. Dengan demikian, kegiatan kaderisasi yang dilakukan secara masif akan menghasilkan kader-kader kualitas dan begitu pula yang terjadi di DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Membentuk Pemerintahan, kebijakan PDI Perjuangan dalam menempatkan kader-kader di Legislatif dan Eksekutif. Penelitian ini menggunakan teori pelembagaan (*party Institutionlization in New Democracies*). Adapun subjek penelitian yaitu pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, kader PDI Perjuangan dan anggota legislatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan penelitian, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan di DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sudah maksimal, *pertama*, pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan sudah begitu baik hal ini dapat dilihat dari proses rekrutmen yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman AD/ART PDI Perjuangan. Hal ini karena PDI Perjuangan sangat konsisten dalam melakukan kaderisasi secara berjenjang/bertahap mulai dari anak ranting sampai tingkat DPP, sehingga membuat PDI Perjuangan mampu menghasilkan kader-kader potensial baik secara internal maupun kepemimpinan nasional. *Kedua*, kebijakan penentuan kader PDI Perjuangan dilegislatif dan eksekutif sudah sesuai dengan AD/ART partai, dapat dilihat bahwa kader yang dicalonkan adalah kader yang sudah memenuhi syarat dan kriteria minimal mengikuti kaderisasi pratama bagi calon legislatif kabupaten/kota, calon legislatif provinsi sudah mengikuti madya, dan calon legislatif pusat telah mengikuti kaderisasi utama/nasional. Selain itu ketua-ketua sekretaris dan bendahara dalam struktural mendapatkan prioritas untuk mencalonkan diri karena sudah menjadi ketentuan partai. Namun dalam PDI Perjuangan sendiri yang mengambil keputusan adalah DPP melalui Ketua Umum karena DPC dan DPD hanya hanya sebatas memberikan rekomendasi. Dengan demikian pengambilan keputusan semi terpimpin sebagai pemberi mandat untuk berkontestasi adalah ketua umum. *Ketiga*, langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi faktor pendukung maupun penghambat di dalam PDI Perjuangan telah diantisipasi jauh-jauh hari, anggaran dikumpulkan melalui gotong royong kader, DPP dan anggota Fraksi dalam mendukung keberlangsungan kegiatan kaderisasi dan musyawarah bersama sebagai bentuk tanggung jawab kader dan partai.

Kata Kunci: Pelembagaan, Partai Politik, Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya partai politik lahir dari negara-negara Eropa Barat, kata partai sendiri, berasal dari kata *part* yang berarti bagian atau golongan, kata “partai” merujuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitas, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata “partai” lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik, karena muncul sebuah pandangan bahwa rakyat seharusnya turut berperan serta menentukan proses politik dalam arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah di dunia politik tidak akan terlalu dominan dan tidak lupa untuk mementingkan kepentingan rakyat. Pada intinya saat itu rakyat ingin agar aspirasinya lebih didengar lagi oleh para penguasa.

Alan Ware menyampaikan bahwa dalam konteks negara modern atau kontemporer, orang sangat sulit berbicara politik tanpa membicarakan partai. Artinya di mana ada pembicaraan politik sekaligus proses-proses politik, di sana terdapat partai politik. Itulah sebabnya, keberadaan partai politik dalam suatu negara (sistem politik), tidak dapat dipungkiri lagi memiliki peranan yang sangat tinggi. Bahkan, bagi sebagian besar kalangan, keberadaan partai politik

dipandang sebagai salah satu indikator berjalannya sistem politik yang mengakui keberadaan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Secara garis besar, partai politik didefinisikan sebagai kelompok terstruktur dengan anggota yang bersatu atas dasar orientasi, prinsip, serta tujuan yang seragam. Ambisi utama mereka adalah untuk mendapatkan kontrol atas arena politik dan menempati posisi strategis melalui prosedur kebijakan yang telah ditetapkan (Mariam Budiardjo, 2008: 160,161). Dengan demikian, partai adalah jembatan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dalam negara demokrasi, oleh sebab itulah partai politik sangat berperan besar kedudukannya, karena partai politik satu-satunya organisasi yang mampu mencalonkan kadernya dalam politik praktis.

Samuel P. Huntington mendefinisikan pelebagaan sebagai sebuah proses dimana organisasi dan prosedur mendapat nilai dan stabilitas, lebih lanjut pelebagaan partai politik yang dimaksud adalah proses pementapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik merujuk sejauh mana partai politik mampu mencapai kematangan secara internal dan eksternal sebagai sebuah organisasi yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Padahal dasarnya tingkat pelebagaan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama partai politik yang baik dalam rangka mendukung demokrasi dan menjamin partai politik mampu bertahan dalam kontestasi pemilu di masa depan.

Mengkaji dengan detail pelebagaan partai, Vicky Randall dan Lars Svendsen sebagaimana dikutip oleh Pamungkas (2011) dalam karya mereka

“Party Institutionalization in New Democracies”, menguraikan bahwa pelebagaan partai politik merupakan suatu proses dimana partai politik diperkuat, dari aspek internal-eksternal dan yang kedua dari aspek struktural-kultural, untuk membentuk perilaku maupun membentuk sikap atau budaya partai politik.

Pelebagaan merupakan dimensi penting untuk memahami sistem kepartaian dalam negara demokrasi atau semi-demokrasi, kerana dengan memahami tingkat pelebagaan partai politik akan mempermudah penjelasan kerasteristik penting sestim kepartaian. Sistem kepartaian menduduki peran penting dalam sistem demokrasi, sistem ketatanegaraan dan konsolidasi demokrasi, sistem demokrasi yang bercirikan kompetisi (kekuasaan), meniscayakan terjadinya perebutan kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan melalui pemilihan, dan hanya bisa dilakukan oleh partai politik untuk mengelola dan mengatur pemerintahan, sebagaimana disampaikan oleh Mainwaring dan Scully yang dikutip oleh Andrey A. Meleshevich: (dalam suatu sitem partai yang melembaga, partai merupakan aktor kunci dalam menentukan akses kekuasaan, pemilihan yang terbuka merupakan suatu proses politik yang menentukan pemerintahan).

Untuk itu partai politik harus mampu berfungsi mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan, baik internal (pengurus, anggota) maupun eksternal (konstituen, masyarakat), menghubungkan kepentingan masyarakat dan negara, untuk proses dalam sistem politik dan memproduksi kebijakan publik, kesehatan sistem politik dan demokrasi serta konsolidasi demokrasi ini memerlukan

syarat: partai politik yang melembaga, untuk bisa mengoperasikan berjalannya fungsi-fungsi partai politik dalam sistem politik dan demokrasi.

Oleh karena itu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Dikutip dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa: partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu *pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutme keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan

kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*; memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal *pertama*; mengkondisikan terbentuknya sisten multi partai sederhana, *kedua*; mendorong terciptanya pelebagaan partai yang demokratis dan akuntabel, *ketiga*; mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang akuntabel dan *keempat*; mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Dari ketentuan di atas sudah cukup jelas terkait pelebagaan dan peran partai politik, secara praktis, partai politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan tingkat pelebagaan, pada umumnya mereka belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik, mala merupakan bagian dari konflik. Konflik internal partai politik yang berujung pada pembelaan geneologis partai politik, melihat proses politik dalam pemilu kepala daerah terkait konflik internal partai politik, misalnya apa yang terjadi pada pemilukada 2006 yang prosesnya mandeg ketika partai-partai politik tidak mengajukan calon, adalah contoh nyata kegagalan pelebagaan partai politik.

Juga disampaikan oleh Ramlan Surbakti, bahwa kelemahan utama partai politik di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena

terlalu didominasi peran pemimpin partai dari pada kedaulatan anggota, lemahnya bangunan ideologi partai (masih dominannya figur-figur sebagai simbol partai atau orientasi politik tokoh sentral secara personal), otonomi partai terkait penyandang dana, dan perbedaan pengetahuan publik tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikampanyekan, pengurus serta aktivis partai politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum melembaga, maka pelembagaan partai politik merupakan agenda wajib untuk mempercepat kestabilan demokrasi.

Salah satu partai politik yang masih bertahan dan berkembang hingga saat ini, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai merupakan partai yang cukup lama, yang bersaing di pesta perpolitikan Indonesia. Partai ini merupakan partai politik yang memiliki sejarah panjang pada masa orde baru. PDI Perjuangan adalah pecahan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai PDI Perjuangan ini terus berkembang dan semakin populer di mata publik, hingga saat hari ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebuah entitas politik besar di Indonesia, memiliki kekuasaan yang signifikan dalam ranah politik nasional dari era reformasi hingga kini, berkat keterlibatan aktif kaum nasionalis dalam dinamika politik melalui penjabaran visi, misi dan nilai-nilai perjuangan dan ideologi yang dianut oleh partai. Kekuatan nasionalisme yang konsisten menjadikan PDI-P sebagai kekuatan yang disegani oleh entitas politik lain, dengan dorongan kuat dari elit politik untuk mencetak kader berkualitas, memastikan keangsuran eksistensi partai tersebut di masa kini dan mendatang.

Apabila kita menelaah Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), khususnya pada BAB III, segmen ketiga, mengenai peranan partai yang terdapat dalam pasal 9, yang meliputi poin a, b, c, d, e, dan f, disebutkan bahwa:

- a. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. Melakukan rekrutmen anggota dan kader partai untuk ditugaskan dalam struktur partai, lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga publik;
- c. Membentuk kader partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. Menghimpun, membangun dan mengerakan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat pancasila;
- f. Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara;

Idealnya, suatu partai politik seharusnya memiliki standar dan proses dalam pelebagaan, seperti rekrutmen, penanaman ideologi serta bertanggung jawab dalam suatu tugas yang diemban. Secara teori, partai politik diharapkan untuk mewakili dan mengadvokasi kepentingan publik, yang harus tercermin dalam fondasi dan tujuan pembentukanya. Anggota partai berperan sebagai lini terdepan dari institusi tersebut, sehingga penting untuk menyusun dan

menginstitutionalisasi sistem pelebagaan yang mencakup dari segala hal mulai dari rekrutmen, edukasi, politik, hingga penanaman ideologi partai. Implikasi dari sistem partai politik di Indonesia, yaitu sistem multipartai, adalah munculnya banyak partai politik. Namun, bertambahnya jumlah partai politik ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas. Partai-partai politik baru sering kali didirikan bukan sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, melainkan sebagai sarana untuk mengumpulkan suara dan merebut kekuasaan saja.

Suatu fenomena yang sering muncul di lingkaran partai politik adalah tantangan dalam mempertahankan anggotanya yang sering berpindah-pindah partai, bahkan tidak sedikit yang mengkhianati partainya itu sendiri dan kendala berikut adalah mengajukan anggota mereka untuk posisi legislatif atau eksekutif. Pemenuhan kuota kandidat seringkali tidak berdasarkan proses pengembangan anggota atau standar yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Bahkan banyak anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini yang keluar dari partai itu sendiri, dan yang selalu mendapat kuota saat ini berasal dari kalangan artis dan pengusaha, yang meskipun tidak selalu cocok, kualitas dan kemampuan mereka dalam pengembangan kader tidak selalu dapat dijamin serta. Di internal DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sendiri salah satu kader menyampaikan bahwa hari ini hubungan struktural DPC dan PAC sampai pada Anak Ranting kurang baik sehingga menjadi problem tersendiri, sekarang justru pendekatannya elitis sehingga tidak sesuai dengan prinsip yang dibangun dalam partai. Lalu hal tersebut juga diperkuat dengan pendistribusian kader dalam

berkontestasi kader yang mendapat utusan melalui keputusan semi terpimpin, sehingga kader-kader yang berada di tingkat bawah tidak mempunyai akses yang sama sebagai representasi secara kelembagaan, hal ini akan melunturkan pemahaman tentang nilai, ideologi dan arah perjuangan setiap kader ternyata bukan itu yang menjadi tolak ukur tetapi soal kemampuan sumber ekonomi dan taat perintah kepada elit partai.

Banyak partai politik memilih untuk menarik figur-figur terkemuka dan berdampak, seperti tokoh besar, artis, pengusaha dan pemimpin lokal, untuk diusung sebagai calon dari partainya. Praktik ini menunjukkan adanya rekrutmen anggota tanpa mengedepankan proses seleksi dan kriteria yang jelas, khususnya dalam era modern. Akhirnya individu yang memiliki kemampuan dan kualitas tinggi sering kali terhalang untuk maju sebagai calon, dikarenakan keterbatasan dana, mengingat biaya untuk berpartisipasi dalam politik yang terus meningkat. Situasi ini mereduksi peluang bagi kader potensial untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Ditambah lagi, adanya persyaratan kuota minimal 30% perempuan dalam pemilu, mendorong partai politik untuk merekrut calon secara cepat demi memenuhi kriteria tersebut, seringkali tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang sesuai.

Dalam kerangka studi ini, tujuan dari penelitian adalah untuk membongkar dan memaparkan metode pelebagaan yang diterapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam membentuk pemerintahan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola politik para kader, yang meliputi manajemen kekuasaan, proses pembuatan keputusan, strategi

kebijakan, dan distribusi sumber daya manusia. Sebagai entitas politik yang mempromosikan identitas nasionalisme, dan berorientasi pada pembentukan kader, menjadi penting untuk mengeksplorasi apakah PDI Perjuangan sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong atau lembaga yang dikerumuni oleh massa, sehingga “pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Membentuk Pemerintahan” menjadi penting bagi peneliti untuk melihat sejauh mana partai tersebut menerapkan pelembagaan dan relasi kekuasaan dalam pemerintahan yang demokratis dalam tubuh partai.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, pernyataan penelitian ini kemudian muncul sebagai berikut:

Bagaimana pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam membentuk pemerintahan?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pelembagaan PDI Perjuangan dalam memebentuk pemerintahan:

1. Struktural dan fungsi PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan.
2. Nilai dan norma PDI Perjuangan dalam memebentuk pemerintahan.
3. Menejemen organisasi PDI Perjuangan dalam memebentuk pemerintahan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami serta menggambarkan struktural dan fungsi PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana nilai dan norma PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan.
3. Untuk mengetahui Menejemen organisasi PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan dapat menghadirkan bagi para pembaca atau peneliti berikutnya, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi Praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi kontribusi ide dan perspektif terkait dengan proses pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan.
 - b. Diharapkan dapat memberikan refrensi dan pijakan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Kontribusi praktis dari penulis bisa dijadikan referensi oleh PDI Perjuangan untuk mengimplementasikan sistem pelembagaan yang efektif, sehingga dapat menciptakan kader yang tidak hanya berkualitas tinggi tapi juga memiliki keunggulan tertentu.

- b. Ini juga bisa dianggap sebagai pertimbangan penting bagi proses pelebagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan. Hal ini tidak terbatas pada lingkup partai politik saja, tetapi juga berpotensi menyediakan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelebagaan partai politik, terutama dalam konteks negara demokrasi seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

F. Literatur Reviw

Inilah rangkaian temuan penelitian yang terdahulu sudah dijalankan beserta referensi untuk penelitian yang akan penulis kerjakan.

Pertama, Jurnal *Administrative Law & Governance* jurnal. Volume 2 Issue4, November 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Aprista Ristyawati (2019) yang berjudul Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadminitasian dan Pelebagaan Demokrasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tiga tentangan krusial yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia saat ini, meliputi penurunan kekuatan ideologi partai, proses rekrutmen, dan pembinaan kader yang tidak memadai, serta masalah dalam penggalangan dana. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya pengukuhan demokrasi melalui pengetahuan ideologi partai, serta peningkatan mekanisme penggalangan dana. Dengan demikian, partai politik dapat berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ideologi, nilai, serta aspirasi partai dengan lebih efektif.

Kedua, jurnal Civic Hukum 5 (1) 2020 halaman 52-61. Penelitian ini dilakukan oleh Nanang Suryana Dkk (2020).

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelebagaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode kualitatif. Bertolak dari kerangka teoritik pelebagaan partai politik, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang berfokus pada empat derajat pelebagaan. Hasil penelitian memperlihatkan derajat kesisteman (*systemness*) dalam proses pelebagaan di tubuh PSI Kota Bandung masih jauh dari kata ideal. Faktor-faktor seperti penggunaan aturan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam konstitusi partai belum mampu diterjemahkan PSI Kota Bandung dalam manajemen keorganisasian. Di level derajat identitas nilai (*value infusion*), PSI Kota Bandung konsisten mengusung nilai yang menjadi landasan partai. Namun, secara praktis beberapa narasi yang diusung partai tidak terlalu mendatangkan insentif secara elektoral. Di *level decisional autonomy*, kondisi PSI Kota Bandung yang hanya mengandalkan sumber pembiayaan partai dari sumber internal, kendati kondisi ini memberikan keleluasaan dan derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan, namun keterbatasan kemampuan keuangan berdampak pada efektifitas jalannya organisasi. Di *level value infusion*, narasi dan isu yang dibawa partai menjadikan mereka dekat dengan segmen pemilih dari kelompok minoritas, baik dari kelompok keagamaan maupun etnis. Di level keempat (*reification*), diferensiasi identitas yang dibawa partai nampak belum membumi di tengah publik Kota Bandung.

Ketiga, Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal, Edisi April 2021 Volume: 3 Nomor: 1. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Wessy Juni Saputri (2021), yang telah memaparkan Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Padang pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

Hasil penelitian mengenai Pelembagaan Parta Gerindra Kota Padang Pemilihan Legislatif Tahun 2019, belum memiliki tingkat pelebagaan yang bagus, dimana indikator pelebagaan menurut Randall & Svasand dengan empat indikator pelebagaan (kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan refleksi) belum terpenuhi. Ditemukan bahwa partai Gerindra Kota Padang terindikasi sebagai komando dari seorang Prabowo Subianto juga menjadikan Gerindra sebagai “partai personalistik”. Sehingga disimpulkan bahwa kemenangan partai gerindra Kota Padang pada Pileg Tahun 2019 bukanlah karena pelebagaan partai yang sudah bagus, akan tetapi lebih cendrung karena dampak dari popularitas Prabowo dan basis pendukungnya yang besar di Sumatra Barat yang secara tidak langsung menjadi sebuah keuntungan kompetitif bagi caleg-caleg partai Gerindra Kota Padang sebagai partai pendukung Prabowo Subiantai.

Keempat, Jurnal Suara Politik (JSP) Voleme 1 Nomor 2, 2022. Peneliti ini dilakukan oleh Lailatul Khadri, Andri Rusta, dan Tengku Rika Valentina (2022). Yang berjudul Permasalahan Pelembagaan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Di Provinsi Sumatra Barat Periode 2019-2022.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan pemerintahan di Indonesia pasca reformasi, membuat negara ini menjadi negara multipartai

munculnya berbagai partai politik ini tentunya mengharuskan Indonesia lebih memperhatikan pelebagaan politik pada setiap partai politik yang ada, karena pelebagaan politik akan berpengaruh pada pengelolaan terhadap internal maupun eksternal partai, sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada keberlangsungan demokrasi di Negara Indonesia. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang diresmikan pada tahun 1998, ini bukan waktu yang sebentar untuk partai ini dapat melembagakan dirinya dengan baik. Akan tetapi, 24 tahun berjalan, PDI Perjuangan di Sumatra Barat memiliki masalah yang sama dari tahun ke tahun, yaitu perolehan suara yang rendah. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh pelebagaan politik yang belum berjalan secara maksimal dalam organisasi partai. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Vicky Randall Dan Lars Svasand yang melihat dari empat dimensi. Bahwa pelebagaan politik PDI Perjuangan belum berjalan dengan baik di Sumatra Barat, karena masih terdapat masalah mengenai pendanaan, otoritas pemimpin, dan citra publik yang buruk.

Kelima, Jurnal Proses Politik (JP POL), Volume 5 Nomor 2 (2023). Penelitian ini telah dilakukan oleh Ignasius Usboko (2023). Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi.

Penelitian ini menguraikan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di daerah Nusa Tenggara Timur ditunjukkan oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil–militer dan pelebagaan partai politik. Pelebagaan menjadi penting dikaji terutama bagaimana derajat kesisteman khusus pengambilan keputusan dan pengetahuan publik dan

dukungan partai Golkar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengambilan keputusan terhadap calon pemimpin dan pemetaan ruang dukungan partai Golkar.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelembagaan partai Golkar dalam hal pengambilan keputusan dimana adanya pendasaran konstitusi partai Golkar meskipun tidak cukup mempertimbangkan usulan dewan pimpinan daerah yang mencakup calon gubernur dan pemetaan ruang dukungan yang cukup signifikan pada 11 kabupaten/kota dari 22 kabupaten /kota di Nusa Tenggara Timur. Hal ini berarti partai Golkar eksis dan terlembaga dengan cukup baik. Saran bahwa Partai Golkar perlu secara konsisten menaati konstitusi partai dengan mempertimbangkan usulan calon pemimpin secara baik sehingga ada dukungan maksimal seluruh anggota partai dan ruang dukungan yang perlu dimaksimalkan melalui pelaksanaan program partai secara continue dan memperluas ruang dukungan ke 11 kabupaten lain secara cukup signifikan agar eksis pada tiap pemilu.

Keenam, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, Halaman 99-108 Januari 2019. Penelitian dilakukan oleh Laila Kholid Alfirdaus. “Dari Identitas ke Ideologi: Pengutan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik ”

Penelitian ini menyajikan permasalahan partai politik di Indonesia saat ini secara mendasar terletak pada karakter pragmatisme yang semakin menguat. Partai dianggap kehilangan ruh idologisnya sehingga menyebabkan arah kebijakan yang diadvokasi partai menjadi miskin identitas. Masyarakat dan

masyarakat pemilih kesulitan membedakan orientasi kebijakan partai karena partai sering menanggapi isu-isu nasional sehari-hari hanya berdasarkan pertama, kepentingan elektoral, dimana partai menolak atau mendukung sebuah kebijakan hanya berdasarkan hitung-hitungan pemeliharaan suara di pemilu. Partai oposisi akan selalu menolak ide partai yang berkuasa, dan sebaliknya, partai yang berkuasa akan selalu menentang oposisi partai oposisi. Faktor penentunya hanya terkait pada apakah partai sedang berkuasa atau menjadi oposisi, bukan pada ideologi sebagai identitas partai itu sendiri. Hasilnya, *pertama*, partai yang sama dapat memiliki pandangan yang berbeda atas isu yang sama pada periode politik yang berbeda, tergantung apakah partai tersebut sedang menjadi partai berkuasa atau partai oposisi. *Kedua*, arah kebijakan partai juga seringkali lebih terkait dengan kepentingan sekelompok kecil elit di dalamnya. Arah kebijakan partai dalam hal ini hanya digunakan untuk melayani kepentingan segelintir orang yang mengendalikan partai, alih-alih kepentingan publik secara luas. Hasilnya, konsistensi partai tidak tercapai, menyebabkan sulitnya memperjelas arah kebijakan partai ke depan. Pilihan politik pun kemudian hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan jangka pendek, menyebabkan lemahnya afiliasi dan identifikasi pemilih politik. Dalam hal ini, kita jelas sedang menghadapi risiko pelembagaan demokrasi dan kepartaian yang lemah. Memikirkan perbaikan landasan ideologis kepartaian dengan demikian menjadi sangat krusial. Pergeseran ideologi di tubuh partai menjadi kebutuhan yang tidak lagi terelakkan.

Ketujuh, Jurnal Wacana Politk Volume 4, Nomor 2, (2019) penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Gelora Mahardika. (2019). Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik yang Demokratis.

Penelitian ini menguraikan bahwa partai politik di Indonesia terlihat kurang memiliki pola pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang sistematis dan demokratis. Pengambilan keputusan tidak mengecewakan pada kebijakan ketua umum partai politik. Hal ini menyebabkan calon yang diajukan oleh partai politik sering tidak disetujui oleh konstituen. Beberapa partai politik mengatur hal tersebut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, namun ketentuan tersebut tidak bisa berjalan maksimal karena aturan Presidential Threshold memaksa partai untuk berkoalisi dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan ini dapat diatasi dengan penerapan pemilihan pendahuluan sebagaimana telah dilakukan beberapa negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Perancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memproyeksikan kebijakan pendahuluan di Indonesia sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis. Dalam analisisnya, artikel ini menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama terkait penerapan pendahuluan di Indonesia. Selain itu artikel ini juga menggunakan studi perbandingan dengan negara lain yaitu Amerika Serikat dan Perancis. Kesimpulan artikel ini adalah penerapan pemilihan pendahuluan perlu dilakukan karena sejalan dengan tujuan regulasi yaitu sebagai upaya menciptakan pelembagaan partai politik yang demokratis

melalui mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh pemilih.

Kedelapan, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 2, (2023), Penelitian ini dilakukan oleh Irma Rachmayani & Arizka Warganera (2023). Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelembagaan partai PDIP belum teraktualisasi, terlihat melalui dominasi pimpinan partai yaitu Megawati Soekarnoputri. Serta dominasi elite politik masih kuat dalam melahirkan kader instan; 2) Kurangnya ideologi yang jelas hampir mengakibatkan tidak adanya ikatan yang kuat antar partai politik. Hampir tidak ada perbedaan yang mencolok dalam hal garis ideologi antara satu partai politik dengan partai politik lainnya. Akibatnya, pemilih terlalu mudah berpindah-pindah pilihannya dalam setiap pemilihan sesuai dengan dinamika sosial politik saat itu; 3) Tingkat partisipasi pemilih (*voters turn out*) terus menurun dalam setiap pemilihan, dan; 4) Tantangan lain bagi PDIP adalah persepsi publik, hingga saat ini PDIP dapat dinilai sebagai partai yang masih lemah. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya ideologi yang dibangun partai tersebut. Citra PDIP sebagai partai adalah “orang kecil”.

Kesembilan, Jurnal Pendidikan Dan pengembangan, Volume 10, Nomor 3 Halaman 674-683, September (2022) Penelitian Ini Telah Dilakukan Oleh M. Agung Lukmanul Hakim, Cecep Dermawan & Leni Anggraeni. Dengan

judul “Demokrasi Minim Oposisi: Narasi Maha Puitis Sejarah Atas Reduksi Oposisi”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Saat menyampaikan Visi Pembangunan tahun 2019-2025, Presiden Jokowi menegaskan oposisi diperbolehkan selama tidak menimbulkan alur fragmentasi dan instabilitas berlebihan. Dalam kesempatan berbeda terkait dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pusat pemerintahan, Presiden Jokowi menampilkan sikap yang kontras dan kontradiktif bahwa tampilan demokrasi Indonesia tidak menganut eksistensi oposisi, melainkan demokrasi berbasis gotong royong. Tentu pernyataan tersebut dinilai sangat tidak kontekstual, kesalahan dalam memahami terminologi demokrasi, bahkan kekeliruan besar dalam melihat substansi sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan berbagai penyelidikan signifikansi dan esensi dari keberadaan kecurigaan, termasuk reduksi dengan kecenderungan yang sedikit signifikan terhadap pelembagaan oposisi. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai eksplorasi hutan raya dari 49 artikel, 6 berita online, serta 6 literatur lain secara mendalam untuk menegaskan konstruksi dari krusialitas oposisional secara normatif dalam demokrasi. Hasil penelitian ini menempatkan eksistensi oposisi sebagai ruh yang melekat dalam prinsip demokrasi, dapat menghadirkan intervensi prima terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih moderat. Dalam sejarah demokrasi Indonesia, setiap rezim yang berkuasa mempunyai kecenderungan yang signifikan untuk melakukan reduksi terhadap kontradiksi dengan penerapan kooptasi dan koersi yang terus

beregenerasi dalam entitas terbaru melalui samaran kontinum. Sebagai pemaksaan dari penelitian ini, sejarah demokrasi Indonesia menjadi untaian narasi puitis panjang atas reduksi eksistensi konsistensi yang terlihat mendapatkan pembenaran dari perjalanan bangsa.

Kesepuluh, Journal Of Political Sphere, Volume 2 Nomor 1 (2021), Penelitian Di lakukan Oleh Amri Wahid Hidayat Dkk. Dengan Judul “Peran Elit Dalam Rekrutmen Eks-Kombatan Gerakan Aceh Merdeka Dan Dampaknya Terhadap Pelembagaan Partai Aceh Pasca Pemilu 2019”.

Penelitian ini menggambarkan bahwa Partai politik mengalami masalah kelembagaan yang belum baik. Tidak terkecuali pada partai lokal Aceh seperti partai Aceh. Sebagai partai hasil transformasi sebuah organisasi yang menuntut kemerdekaan, partai ini mengalami masalah dalam program rekrutmennya yang mana kader-kader yang ada di dalamnya adalah mantan kombatan GAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan akan menganalisis peran dari elite eks kombatan GAM dalam rekrutmen politik yang terjadi di dalam partai Aceh dan pengaruhnya terhadap pelembagaan partai. Partai Aceh sendiri hingga saat ini belum melakukan rekrutmen terbuka dan kaderisasi berjenjang. dengan kata lain, partai Aceh masih menggunakan pola rekrutmen tertutup. Sehingga secara kelembagaan, partai Aceh belum tercukupi dari segi sumber daya manusia (kader) dan berdampak pada pelembagaan partai yang tidak baik. Lemahnya kelembagaan partai ini diintimidasi oleh lemahnya kemampuan PA dalam beradaptasi dengan tatanan demokrasi yang menuntut partai politik untuk

terbuka dan melakukan kaderisasi yang berjenjang untuk melahirkan kader-kader yang kompeten dan profesional. Peran dan pengaruh elite kombatan GAM dalam rekrutmen politik di PA adalah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan dan penyusunan program rekrutmen terbuka dan kaderisasi yang akan dilakukan PA sendiri pengaruh besar dan peran pimpinan PA saat ini yang berlatar elite GAM.

Secara gambaran umum dari penelitian terdahulu mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada topik penelitian yaitu Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Dalam Demokrasi yang sama-sama ingin mengurai terkait pelembagaan beberapa partai di Indonesia baik dalam pengelompokkan secara kultural maupun secara struktural kaitannya dengan pelembagaan dan penguatan partai. Dan juga terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu yang lebih pada aturan partai dan kontestasi elektoral sedangkan penelitian ini ingin menggambarkan pelembagaan dalam pembangunan demokrasi serta metode-metode yang digunakan juga bervariasi. Selain itu, dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat perbedaannya secara kultur masyarakat di suatu daerah partai berada, jika dalam konteks penanaman ideologi partai politik. Dengan demikian yang berkaitan dengan pelembagaan partai politik tetap memiliki motif yang sama dalam menarik simpatisan seseorang maupun kelompok untuk ikut bergabung di dalam organisasi partai politiknya.

G. Kerangka Konsep

1. Partai Politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebuah partai politik didefinisikan sebagai entitas nasional yang dibangun oleh sejumlah warga negara Indonesia secara volunter dengan fondasi kasatuan, aspirasi dan tujuan untuk mengadvokasi serta melindungi hak-hak politik dari anggotanya, komunitas negara, dan bangsa. Tugas mereka juga termasuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar.

Ichlasul Amal (2012) dalam buku *teori-teori partai politik*. Menyatakan bahwa partai politik merupakan sebuah entitas yang menominasikan individu-individu untuk posisi-posisi dalam pemerintahan yang selanjutnya akan dipilih oleh masyarakat, dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Mariam budiarjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008. Mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok yang terstruktur dengan anggota yang bersatu dalam orientasi, nilai, dan aspirasi yang serupa, berambisi

untuk menguasai dan menempati posisi kekuasaan melalui metode yang dijamin oleh konstitusi. Ia juga menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai alat yang memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses pengelolaan negara.

Sigmund Neumann (1963). Mendefinisikan partai politik sebagai sesuatu kelompok yang terdiri dari para pelaku politik yang bertujuan mendapatkan kendali atas lembaga pemerintahan dan memenangkan hati masyarakat dengan cara berkompetisi terhadap kelompok lain yang memegang ideologi yang kontras.

Menurut pandangan Carl J. Friedrich (1967-415). Partai politik didefinisikan sebagai perkumpulan individu yang terstruktur dengan baik dan bertujuan untuk mengambil alih atau memelihara kekuasaan di pemerintahan untuk pemimpin mereka, sambil menyediakan keuntungan baik yang bersifat ideologi maupun material kepada para anggotanya.

Giovanni Sartori (1976) mengemukakan bahwa partai politik merupakan entitas politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan tujuan menghasilkan perwakilan yang akan menduduki posisi-posisi dalam pemerintahan melalui proses pemilihan tersebut.

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu *pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpolat atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan

perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutme keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*; memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal *pertama*; mengkodisikan terbentuknya sisten multi partai sederhana, *kedua*; mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, *ketiga*; mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang akuntabel dan *keempat*; mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

2. Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Suerjono Seekanto (1983) mengemukakan bahwa organisasi yang terinstitusionalisasi merupakan suatu mekanisme yang mengintegrasikan norma-norma yang dihayati oleh anggotanya dalam struktur lembaga, serta adanya stabilitas dan kapalitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Proses pelembagaan ini membutuhkan waktu hingga aturan dan tata cara organisasi yang diakui sebagai norma dan perilaku kolektif. Norma-norma di masyarakat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda seperti yang dibedakan oleh Soerjono menjadi cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*customs*). Proses ini menunjukkan

bagaimana norma-norma internal dalam suatu organisasi perlu diakui dan diterima secara luas sebelum organisasi tersebut dapat dianggap sebagai lembaga yang mapan dalam masyarakat. Sebagai contoh, distribusi kekuasaan terhadap individu tertentu diatur oleh norma-norma yang berlaku yang mana norma tersebut memfasilitasi persepsi positif atau negatif terhadap tindakan individu. Proses pelebagaan dengan demikian, mendefinisikan cara dimana berbagai unsur, seperti perilaku, etika, norma, terintegrasi dalam institusi, menjadikan norma sebagai komponen kunci dalam proses formulasi tersebut.

Proses menjadi sebuah organisasi yang matang, yang dikenal dengan pelebagaan atau institusionalisasi, diidentifikasi oleh komitmen organisasi terhadap prinsip dan nilai-nilai tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Selznik (dalam Dacin, 2002). Menurut Guy Petres (1999:29), pelebagaan atau institusionalisasi menekankan pada evolusi organisasi ke arah status yang lebih stabil dan diakui. Walaupun proses ini mengakui adanya elemen perubahan yang dinamis, pendekatan terhadap institusionalisasi lebih cenderung untuk memfokuskan pada efek yang ditimbulkannya dari pada dinamika perubahan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah kelompok masyarakat mengadopsi dan meyakini norma, ideologi, serta nilai yang mereka anggap esensial untuk kelangsungan hidup mereka, maka individu dalam kelompok tersebut akan mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip tersebut sebagai pandangan hidup mereka. Ini menunjukkan proses pelebagaan yang

terlembaga. Sehingga lembaga begitu penting dalam upaya menyatuhkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama melalui proses-proses mengenai kebutuhan dalam sepanjang sistem yang stabil dan terbukti itulah pelembagaan. Dalam konteks negara demokrasi seperti Republik Indonesia, keberadaan partai politik menjadi syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa partai politik, pencapaian kekuasaan nasional menjadi sesuatu yang tidak dapat direalisasikan karena ketiadaan syarat yang diperlukan. Maka partai politik sangatlah penting bukan saja untuk mencapai kekuasaan tetapi bagaimana institusi/organisasi ini menghasilkan kader yang kompeten dan berkualitas untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

3. Partai sebagai Pembentuk Pemerintahan

Proses pembentukan pemerintahan yang dimaksud adalah langkah penyadaran seseorang yang bergabung dalam sebuah entitas untuk mencapai kematangan yang diinginkan masyarakat yang partisipatif, berkelanjutan dan transformatif dengan tujuan peningkatan kemampuan (*capacity building*) agar memudahkan menjawab persoalan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat dan tentunya dapat berdampak pada peningkatan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Fungsi artinya tindakan yang dilakukan oleh partai itu sendiri atau pemerintah yang berwenang melaksanakan peran aktif dengan membina, memberikana fasilitas, dan dapat meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* guna keluar dari seluruh kebelengguan yang sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Pada sisi keberhasilannya akan diukur dari

seluruh rangkaian proses dan fungsi sebagai indikator utama berhasil atau tidaknya *governing* itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan prinsip utama dalam AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P. Bahwa sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan. Sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Abraman Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat Yang ke-16, mengetakan bahwa “*democracy is governmen of the people, by the people and for people*” atau “demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Karena itu, pemerintahan dikatakan demokratis, jika kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.

Dalam mendukung pelaksanaan demokarsi, membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang keberlangsungan suatu sistem demokrasi yang baik. Menurut Robert A. Dahl, mengemukakan setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni: *pertama*, para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi pemerintahan demokrasi moderen ini merupakan demokrasi perwakilan. *Kedua*, pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. Para pejabat dipilih melalui

pemilu. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya halangan dan ancaman dari penguasa. *Keempat*, akses informasi-informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif. *Kelima*, otonomi asosiasional, yakni, warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang inklusif.

Berdasarkan argumen yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa proses dalam membentuk pemerintahan adalah metode sistematis untuk mengembangkan perwakilan dalam lembaga pemerintahan yang disepakati oleh organisasi dan rakyat melalui pemilu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2017) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan, mengeksplor, menganalisis fenomena aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok yang dianggap mempunyai keterkaitan masalah sosial. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2020:29), pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan objek penelitian berlandaskan data yang terkumpul. Dalam pelaksanaannya, pendekatan deskriptif menentukan pada pemahaman mendalam dengan memanfaatkan teori sebagai kerangka acuan bagi peneliti, serta mengutamakan realitas yang ada di lapangan. Dengan berdasarkan fakta di lapangan peneliti menganalisis, menggambarkan dan

melukiskan suatu fenomena yang terjadi untuk memperoleh ketepatan dalam pengkajian hasil.

2. Objek Penelitian

Sugiyono (2019:55), mengemukakan bahwa objek penelitian mencakup berbagai entitas dalam bentuk apapun yang dipilih oleh peneliti sebagai fokus kajian guna mendapatkan dan mengenai entitas tersebut, yang selanjutnya akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada Proses Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mewujudkan Demokrasi, yang dilaksanakan di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian berada di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Arikunto (2016:26) mendefinisikan subjek penelitian sebagai entitas baik itu objek, fenomena, atau individu di mana data terkait variabel penelitian bersandar dan menjadi fokus permasalahan. Untuk penelitian ini, pemilihan sumber dan dijalankan melalui teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sumber data berbasis pada kriteria tertentu, yaitu individu-individu yang dianggap kompeten dalam menyediakan data relevan dengan topik penelitian, yakni *Governing* Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Mewujudkan Demokrasi.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang antara lain:

1. Wakil Sekretaris Bidang Internal
2. Bendahara
3. Wakil Ketua Bidang Politik
4. Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
5. Ketua Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

Tabel 1. 1 Profil Subjek Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Jabatan
1	Dody Puryanto	56	S1	Wakil Sekretaris Bidang Internal
2	Endro Sulaksono	46	S1	Bendahara
3	Stanislaus K Loka Agustinus	52	S1	Wakil Ketua Bidang Politik
4	Darini	51	S1	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
5	Made Dwi Putra	66	S1	Ketua Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

5. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Suriyono (2016:203) menyatakan bahwa observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi tertentu, bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap layak yang juga didapatkan melalui metode survei wawancara dan analisis pekerjaan. Penelitian ini akan mengandalkan observasi lapangan untuk memahami kondisi dan situasi yang sebenarnya di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta dalam Konteks Pelembagaan PDI Perjuangan Dalam mewujudkan Demokrasi.

b. Wawancara

Barger (dalam Kriyantono, 2020:289) mendefinisikan wawancara sebagai dialog antara peneliti (individu yang berusaha untuk mengumpulkan data) dan sumber (orang yang dianggap memiliki pengetahuan krusial mengenai suatu subjek). Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menerapkan dua varian wawancara yang dinilai sesuai, yaitu wawancara mendalam dan wawancara terstruktur. Menurut Moleong (2005:186), wawancara mendalam didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengeksplorasi informasi secara detail, terbuka, dan tanpa batasan mengenai isu serta titik puast dari studi sedang dilakukan. Teknik ini membutuhkan persiapan khusus berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Berbeda dengan itu, dalam wawancara yang terstruktur, peneliti akan mengajukan

serangkaian pertanyaan yang berhubungan langsung dengan tema penelitian, dan responden diharapkan menyediakan data atau respons yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) menguraikan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan informan melalui sumber-sumber tulisan seperti buku, arsip, dokumen, catatan menarik dan visual berupa laporan dan deskripsi yang berkontribusi pada penunjang penelitian. Dalam konteks ini, keberadaan data spesifik sangat vital untuk mendukung kajian mengenai pelebagaan PDI Perjuangan dalam Demokrasi. Peneliti memerlukan berbagai sumber informasi yang relevan, termasuk AD/ART PDI Perjuangan, Profil serta dokumen lain yang dianggap esensial untuk analisis penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi metodologi analisis data yang diperkenalkan oleh Milles & Huberman (1984), mencakup empat aktivitas inti yang saling terkait dan berlangsung sebelum, selama, serta setelah akuisisi data secara paralel untuk mengembangkan pemahaman umum, sering kali diidentifikasi sebagai analisis keempat elemen penting tersebut meliputi Akuisisi Data, Kondensasi Data, Demostrasi Data, dan Elaborasi Kesimpulan/Verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengambilan data mencakup observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Informasi yang diperoleh akan direkam, dianalisis, dan diuraikan secara terperinci dalam penelitian, sehingga menghasilkan data primer dan sekunder.

b. Reduksi Data

Proses pengurangan data dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif deskriptif melalui seleksi, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data mentah yang diperoleh di lapangan secara tertulis. Pengurangan ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi data yang relevan dan spesifik terkait dengan subjek penelitian dan memfasilitasi pencarian data tambahan bila dibutuhkan.

c. Penyajian Data

Pemaparan data melalui narasi teks yang berisi catatan chat lapangan, penggunaan matriks, diagram, graf, serta chat secara terstruktur memudahkan pemahaman secara holistik atau detail tertentu dalam kerangka kesatuan yang utuh.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ditarik oleh peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian, data dianalisis yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang tersedia.

BAB II

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN

A. Proses Membentuk Pemerintahan

Pada Pemilihan Umum 2024 PDI Perjuangan berhasil menang di empat kabupaten kota, tetapi di Kabupaten Gunungkidul kalah tipis dari Partai Golkar. Perolehan suara terbanyak di Bantul (34,1%), Kota Yogyakarta (26,7%), Sleman (21,7%), Kulon Progo (21,3%). PDI Perjuangan dan diikuti partai Golkar yang secara genealogi adalah partai nasionalis masih menjadi pemenang pemilu 2004. Hasil di atas, menunjukkan bahwa PDIP masih menjadi partai yang mendominasi, namun mengalami tren penurunan suara dari hasil pemilu sebelumnya. Khususnya di Kota Yogyakarta mengalami penurunan sekitar 15% suara, hal ini mengindikasikan strategi dan basis politik yang dinamis membuat PDIP belum optimal sehingga mengalami hal tersebut.

Pemilihan umum 2014 kembali PDI perjuangan menunjukkan taringnya PDI Perjuangan berhasil menang di seluruh kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peroleh suara terbanyak di Kota Yogyakarta (29,5%), Sleman (28,3%), Kulon Progo (22,7%), dan Gunungkidul (22,5%). Kemenangan PDIP 2014 menegaskan bahwa nasionalis tetap menjadi ideologi utama.

Kemengan pemilihan umum 2019 merupakan kembalinya PDIP menang yang sebelumnya unggul di seluruh kabupaten kota dengan perolehan suara mayoritas di atas 30%. Peroleh suara di Kota Yogyakarta (41,1%),

Sleman (30,8%), Bantul (30,6%), Kulon Progo (27,9%), dan Gunungkidul (22,3%).

Pada pemilihan umum 2024 kembali PDIP mengungguli partai-partai lain khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. PDIP berhasil meraup suara sebanyak 27.370 atau 25,15% suara. Kemenangan PDIP yang merupakan representasi nasionalis di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai pemilu 1999 sampai 2024 menunjukkan bahwa nasionalis merupakan ideologi politik yang dipegang teguh oleh masyarakat Yogyakarta, ideologi yang mendarah daging dan melekat erat di kota bersejarah sejak masa kolonial hingga kemerdekaan.

Alasan mengapa PDIP mempunyai basis kuat di Daerah Istimewa Yogyakarta karena sejarah (*historis*). Sejarah lahirnya Pancasila 1 Juni, maka diikuti dengan perluasan sejarah perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dari situlah koneksitas historisnya terlihat Serangan Umum 1 Maret, tersebut ditetapkan sebagai hari kedaulatan negara, dimana peran itu dalam pelurusan sejarah yaitu kader-kader PDI Perjuangan. Aspek-aspek historis selalu menjadi pegangan kader-kader banteng untuk terus turun ke bawah dalam memenangkan PDIP di Yogyakarta. Lalu, ingatan masyarakat terkait ketokohan Soekarno dan dilanjutkan Trah (keturunan Soekarno) yaitu Megawati Soekarnoputri yang menahkodai PDIP. Selanjutnya keterkaitan ideologi bahwasanya masyarakat menganggap PDIP yang merepresentasikan ideologi Pancasila dan golongan nasionalis tanpa membedakan latar belakang menjadi positif, sehingga dianggap PDIP adalah partai senantiasa menjaga

Kedaulatan Negara Indonesia. Alasan berikutnya, kerana peran tokoh-tokoh maupun kader-kader yang betul-betul menjalankan tugas dan wewenang ketika masyarakat memilihnya. Kepercayaan inilah yang memberikan nilai positif terhadap pandangan masyarakat bahwa PDIP dapat dipercaya dalam mengaspirasikan kepentingan masyarakat kecil “wong cilik”. Lalu partai juga memperkuat basis akar rumput dan sayap partai yang ada, mobilisasi inilah yang kemudian menjadi senjata partai selama bertahun-tahun mampu menjadi partai pemenang.

Jejak masa lampau (*past record*) adalah sejarah dilakukan oleh partai politik, baik itu kebijakan ataupun ketokohan yang telah diambil sebelumnya. Sejarah partai juga menjadi bukti nyata dari sebuah konsep, ideologi dan kebijakan yang dimiliki oleh partai. Kemudian jejak masa lampau dari partai akan berdampak pada penilaian masyarakat tentang partai tersebut. Selama orde lama, kelompok Komonis dan Nasionalis sudah memiliki basis pemilih di Kota Yogyakarta, PKI dan PNI merupakan partai yang sudah dikenal di Yogyakarta sejak pemilu 1955. Pada saat itu mendapatkan suara masing-masing dengan jumlah 237.000 dan 270.000 suara. Sebagaimana jejak masa lampau sejarah PDIP di Kota Yogyakarta, sejarah perkembangan PDIP di Yogyakarta selalu mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Bilah melihat sejarah PDIP merupakan hasil fusi dari partai non Islam. Sehingga wajar apabila banyak dari kalangan Katholik dan Kristen yang berafiliasi ke PDIP. Kelompok kaum buru juga memiliki kedekatan dengan PDIP. Sejarah fusi partai juga berpengaruh terhadap hasil dari pemilihan umum yang memajukan kekuatan partai

nasionalis sejak tahun 1999 sampai 2024 yang terbaru, setelah berhasil mengungguli partai politik Islam di Kota Yogyakarta (Al-Hamidi sebagaimana yang dikutip Radinal, 2018).

PDIP Perjuangan merupakan salah satu partai non-Islam yang ada di Indonesia, begitu juga di Kota Yogyakarta. Sejak keikutsertaannya dalam pemilihan umum, PDIP selalu unggul dari partai politik lainnya. Hal ini tidak terlepas dari jejak masa lalu atau *past record* yang dimiliki PDIP dalam pemilihan umum jejak masa lalu mempengaruhi ekstensi partai terhadap masyarakat. Hal seperti itu menjadi daya tarik masyarakat untuk tetap loyal pada PDIP. Mobilisasi yang dilakukan pada kader PDIP dari DPD, DPC, PAC dan Ranting-Ranting se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggelar aksi demo di jalan Malioboro, untuk mendukung penetapan Keistimewaan (Fay, 2010). Dukungan PDIP tentang Keistimewaan Yogyakarta juga dilakukan oleh fraksi PDIP DPR RI yang menyatakan keinginan pemerintah untuk mempermasalahkan Keistimewaan Yogyakarta sama artinya mencederai hati masyarakat Yogyakarta dan alasan yang dibuat oleh pemerintah dirasa kuat. Lalu sikap dukungan langsung kader dari DPP melalui sejken PDIP. Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa salah satu alasan mengapa PDIP di Yogyakarta dari tahun 1999 selalu memenangkan pemilu, sehingga untuk timbal baliknya apa pun yang diinginkan masyarakat Yogyakarta secara mayoritas akan mendapat dukungan (Viva, 2010). Hingga sampai pada saatnya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY, PDIP mengadakan syukuran

UUK DIY dan rapat kerja Daerah PDIP yang dihadiri seluruh kader partai, tokoh-tokoh dan masyarakat umum (Parwinto dalam Radinal, 2018).

Dengan berbagai pandangan di atas mengapa Kota Yogyakarta menjadi basis PDIP memang tidak terlepas dari sejarah (*historis*) daerah dan partai itu sendiri. Masyarakat Yogyakarta mempunyai beban moral begitupun PDIP sehingga timbal balik inilah yang kemudian merekatkan secara ideologi. Dengan demikian, masyarakat Yogyakarta secara kultur akan menyatu, di lain sisi faktor ketokohan kader PDIP selalu menjadi dominasi di lembaga legislatif dan terpilih menjadi ketua DPRD bahkan ketua komisi-komisi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kerja-kerja politik jalan dengan baik dan terus menggelorakan spirit partai dan membangun basis melalui jalur lembaga legislatif serta kader turun langsung di basis rakyat sehingga membuat partai ini terus kuat dan terlembaga secara alami

1. Visi dan Misi PDI Perjuangan

Visi partai merupakan gambaran situasi ideal di masa mendatang yang dikejar oleh partai, sehingga menjadi pedoman dalam perjuangan yang dilakukan oleh partai.

Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar PDI Perjuangan adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;

- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme dan sosio demokrasi (Tri Sila);
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; dan
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Misi PDI Perjuangan:

Amanah kehidupan yang dipikul oleh partai ini, seraya menjadi fondasi dari pemikiran untuk kelangsungan keberadaan partai, seperti yang tertuang dalam pasal 7, 8, 9, dan 10 dari Anggaran Dasar Partai, merupakan esensi dari Visi partai:

Pasal 7 Partai merupakan tujuan umum:

- a. Mencapai aspirasi yang dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, seperti Yang dijabarkan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia 1945, dengan tujuan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang penuh keadilan dan kemakmuran di

bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika; serta

- b. Berupaya keras untuk menciptakan kondisi Indonesia yang makmur dengan keadilan sosial, memiliki kedaulatan penuh dalam ranah politik, mandiri ekonomi, dan menampilkan identitas yang kuat dalam budaya.

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. Mengembangkan gerakan politik yang didorong oleh kekuatan massa demi menciptakan kesejahteraan yang ada secara sosial;
- b. Mencetuskan motivasi, menyatukan keinginan, merancang aksi dan kekuatan masyarakat, mengedukasi dan mengarahkan masyarakat untuk menciptakan kesadaran politik dan merangkul seluruh energi masyarakat dalam sebuah gerakan politik guna mencapai kebebasan politik dan ekonomi;
- c. Berupaya memastikan hak-hak masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup keperluan material seperti pakaian, makan, tempat tinggal, dan kebutuhan spritual seperti kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan;
- d. Berusaha untuk meraih kekuasaan politik melalui jalur konstitusional sebagai sarana untuk merealisasikan visi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan pemerintahan yang melindungi seluruh warga negara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan bersama, memperkaya intelektual bangsa,

serta berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; dan

- e. Membentuk solidaritas dan menjalin kerja sama internasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Dasasila Bandung untuk mewujudkan aspirasi yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- a. Mengejar dan menyebarkan pencerahan kepada masyarakat untuk mengemban tanggung jawab dalam menjalankan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara;
- b. Menyelenggarakan proses penerimaan anggota baru serta pengkaderan di dalam partai untuk ditempatkan dalam struktur organisasi partai, badan-badan politik, dan institusi publik;
- c. Menciptakan kader-kader partai yang bersemangat inovatif, serta dilengkapi dengan pemahaman dan kapasitas untuk menerapkan serta menjalankan ideologi Bung Karno dalam aktivitas sosial, kebangsaan, dan kenegaraan;
- d. Mengumpulkan, merancang, dan berjuang demi realisasi aspirasi masyarakat menjadi kebijakan pemerintah;
- e. Kumpulkan, kembangkan, dan mobilisasi kekuatan rakyat dalam rangka membangun serta mewujudkan visi masyarakat berdasarkan Pancasila; serta

- f. Menyusun strategi komunikasi politik yang berakar pada prinsip dasar kehidupan politik, sekaligus mengembangkan partisipasi politik dari para warga negara.

Pasal 10 Partai mempunyai tugas:

- a. Memperteguh komitmen terhadap aspirasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, sebagai fondasi Republik Indonesia;
- b. Memperkuat, menyebarluaskan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi filosofis, visi kebangsaan, dan tata kelola negara;
- c. Menerjemahkan, menyebarkan, dan mengakarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Bung Karno dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan kenegaraan;
- d. Mengumpulkan serta berjuang demi kepentingan rakyat dengan berlandaskan ideologi Pancasila 1945, menggunakan metode Trisakti sebagai acuan strategi dan arah kebijakan partai;
- e. Berusaha agar kebijakan politik partai diadopsi sebagai kebijakan negara;
- f. Menyiapkan anggota partai untuk menjadi perwakilan partai dalam proses politik dan publik;
- g. Berusaha mempengaruhi dan memantau pemerintahan agar selalu bertumpu pada Pancasila 1 Juni 1945 dan konstitusi Republik Indonesia 1945 dengan mengikuti metode TRISAKTI sebagai pedoman dan

tujuan politik partai, untuk menciptakan pemerintahan yang tangguh, efisien, integritas tinggi, dan berotoritas;

- h. Sebagai titik tengah kekuatan politik nasional, harus aktif merawat dan memperkuat semangat Dasa Sila Bandung, guna memajukan konsilidaasi dan solidarirats anantara negara sebagai upaya menentang liberalisme dan individualisme

2. Ideologi PDI Perjuangan

Berangkat dari peraturan partai politik tahun 2008 memungkinkan partai politik untuk menampilkan karakteristik unik yang menunjukkan visi politik mereka, asalkan ini tidak konflik dengan prinsip prinsip Pancasila dan UUD Tahun 1945. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengadopsi Pancasila sebagai fondasi ideologinya, yang merujuk pada edisi Pancasila tanggal 1 Juni 1945.

PDI Perjunagan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), disebutkan partai ideologis yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Sementara itu, jati diri partai ialah kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ideologi partai ini berwujud Maerhaenisme yang diidentifikasi sebgai pembelaan kepada wong cilik dan harus dipraktekkan dalam setiap kebijakan pembangunan bagi kedaulatan rakyat (*kompas, 2010*).

Selain posisi ideologis sebagai partai yang berseberangan dengan Orde Baru, PDIP juga memiliki kapital simbolik kuat yang dipegang Megawati Soekarnoputri sebagai putri sang Proklamator Soekarno. Bangunan ideologi dan kapital simbolik inilah yang menjadi faktor penting kemenangan PDIP di pemilu pertama era reformasi. Jika melihat kekuatan ideologis, ketiga partai terkuat yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra pada pemilu 2019 tersebut sama-sama cenderung ke arah partai nasionalis. Namun, sisi simbolik sebagai partai yang memiliki posisi oposan terhadap orde baru tampak tetap menjadi kekhasan yang dibawa PDI Perjuangan dibandingkan kedua partai lainnya. Dengan demikian, tradisi partai nasionalis memenangkan pemilu memang sudah mengakar dan masyarakat secara sosiologis terikat dengan historis maupun ketokohan partai kader.

3. Dinamika Politik PDI Perjuangan

Melihat dinamika politik yang terjadi, pada pemilihan umum 2024 tampaknya menguji bagaimana konsolidasi PDI Perjuangan tetap terjaga demi meneruskan tradisi merebut posisi yang kuat dalam panggung politik di Indonesia. Sekaligus juga akan dibuktikan apakah mutualisme PDIP pada pemilihan yang telah selesai. Akan tetapi, tampaknya ada hal yang lebih mendalam yang akan diuji kekuatannya, yakni perkara ideologis dan kapital simbolik PDIP. Di tengah pragmatisme politik yang terbatas pada kalkulasi menang dan kalah, sisi idealisme dalam berpolitik ini semestinya layak untuk dijunjung oleh PDIP.

PDI Perjuangan pada kontestasi pemilu 2024 justru mengalami dinamika internal partai. Ketika Presiden Joko Widodo sekaligus kader partai PDIP terang-terangan mendukung salah satu capres-cawapres yang tidak lain adalah anak kandungnya (putra mahkota) yang juga kader PDIP. Gejolak di dalam internal partai tentu merupakan keuntungan bagi partai lain untuk mengalahkan PDIP, dan terbukti pada perjalanan kader-kader potensial dan loyalitas Jokowi keluar dari partai yang telah membesarkan nama mereka. Ini tentu merupakan pukulan telak bagi PDI Perjuangan dalam menakar ideologi dan loyalitas kader terhadap partai, dengan keadaan yang terjadi justru PDI Perjuangan belum mengambil sikap yang jelas terhadap kadernya yang terang-terangan berbeda politik dan bahkan menjadi lawan politik.

4. Azas PDI Perjuangan

Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertera dalam pasal 5 ayat (1) bahwa partai ini mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia mencerminkan esensi dan roh dari tanggal 1 Juni 1945.

5. Tujuan PDI Perjuangan

Partai mempunyai tujuan umum:

- a. Realisasi aspirasi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana diuraikan dalam prakata Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk menciptakan suatu komitmen yang

sejahtera dan adil di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semangat kebhinekaan yang terpadu, serta

- b. Mengupayakan tercapainya kesejahteraan sosial bagi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan memiliki identitas yang unik dalam budaya.

Pasal 8

Partai mempunyai tujuan khusus:

- a. Inisiasi gerakan politik yang diakari oleh kekuatan massa demi menciptakan kemakmuran dengan keadilan sosial;
- b. Mencetuskan motivasi, menguatkan keinginan kolektif, menyusun aktifitas serta daya massa, membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk menciptakan kesadaran politik serta mengintegrasikan tenaga masyarakat ke dalam satu gerakan politik guna mencapai kemandirian politik dan ekonomi;
- c. Berupaya keras dalam memastikan hak-hak masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan fokus utama pada penemuan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan spritual meliputi kebudayaan, pendidikan, serta kesehatan;
- d. Mengusahakan penguasaan kekuatan politik melalui jalur konstitusional sebagai sarana untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mendirikan pemerintahan yang melindungi seluruh warga negara

Indonesia, mendorong kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada terciptanya tatanan dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; serta

e. Merajut solidaritas dan memperkuat kerja sama internasional dengan mengusung nilai-nilai Dasa Sila Bandung, dalam rangka merealisasikan aspirasi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dasa Prasetya PDI Perjuangan

- 1) Mengukuhkan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta memastikan keberagaman bangsa terlindungi.
- 2) Menuatkan tradisi gotong royong untuk bersama-sama mengatasi tantangan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui pengorganisasian ulang sistem produksi, pelaksanaan reformasi agraria, penyediaan proteksi, pengembangan akses pasar dan kapital.
- 4) Menjamin ketersediaan makanan serta hunian yang memenuhi standar kesehatan dan kaptuan untuk rakyat.
- 5) Menghapuskan biaya pengobatan dan pendidikan bagi rakyat.
- 6) Menyajikan layanan publik yang efesien, cepat, dan ekonomis.
- 7) Memelihara ekosistem dan sumber daya alam, serta secara konsiten mengimplementasikan peraturan penggunaan ruang.

- 8) Merevolusi birokrasi pemerintahan guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terbatas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 9) Mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dalam pembuatan kebijakan.
- 10) Menerapkan hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Mengacu pada uraian mengenai Trias Dinamika Partai serta Dasa Prasetya, dan mempertimbangkan kapasitasnya dalam mengakomodasi inisiatif-inisiatif yang mendorong dinamisasi partai secara berkelanjutan dan maju, Kongres III PDI Perjuangan menyatakan kebutuhan untuk mengukuhkan landasan program partai, yaitu Trias Dinamika Partai, serta visi program partai yaitu Dasa Prasetya, sebagai doktrin perjuangan esensial yang harus dijalankan oleh seluruh unsur dalam tiga pilar partai (Eksekutif, Legislatif, dan Struktural) di berbagai level dan di semua daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kongres III PDI Perjuangan, disepakati bahwa penetapan Trias Dinamika Partai dan Dasa Prasetya sebagai doktrin perjuangan partai akan mengaktifkan semua elemen partai untuk bergerak secara serentak dan dialog dalam aksi bersatu partai. Tujuannya adalah untuk menerapkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 sebagai agenda kerja partai yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

7. Kepemimpinan PDI Perjuangan

Kriteria pemilihan pemimpin di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergantung pada dedikasi terhadap ideologi, kesetaraan, aktivitas partai, serta pemanfaatan lembaga banteng berhidung putih sebagai sarana pengorganisasian masyarakat. Memilih pemimpin utama berdasarkan popularitas ketimbang kontribusi organisasional mencerminkan praktek demokrasi liberal. PDI Perjuangan menggunakan Survei objektif sebagai kriteria untuk menentukan calon kepala daerah, bukan berdasarkan kinerja kepemimpinan internal. Kami telah menantisipasi adanya survei tersebut sebagai taktik untuk intervensi politisi terhadap urusan internal partai, khususnya di PDI Perjuangan. Kami tetap teguh pada prinsip ideologis partai, di mana keputusan kepemimpinan diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Dalam diskusi tersebut, kekuatan finansial tidak memiliki pengaruh, menggambarkan praktek demokrasi pancasila.

Melalui proses konsolidasi yang menimbang dengan serius prioritas dan kebutuhan yang lebih luas, situasi politik di Indonesia khususnya posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang utama pemilihan umum, menuntut kepemimpinan dari seseorang yang tangguh, berprinsip kuat, memiliki integritas, dan catatan keberhasilan dalam memimpin. Berangkat dari premis ini, Rakernas IV dan V telah mengukuhkan kembali posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum, dan visi menghadapi tantangan masa depan, membuat Megawati Soekarnoputri dianggap sebagai pemimpin yang

memberikan rasa keamanan bagi anggota PDI Perjuangan. Dalam Rakernas V yang berlangsung di Bali, PDI Perjuangan secara konsisten memilih Megawati Seokarnoputri melalui proses musyawarah, mengedepankan prinsip internal partai yang juga diterapkan dalam kepemimpinan nasional, baik di eksekutif maupun di legislatif. PDI Perjuangan menekankan bahwa tidak ada kader yang diberi hak istimewa tanpa melewati proses yang adil dan terstruktur, menjamin keadilan untuk semua anggota. Nilai-nilai ini telah menjadi inti dari perjuangan partai, yang dikenal dengan julukan “Wong Cilik”, menegaskan komitmennya sebagai partai yang inklusif dan berlandaskan Pancasila.

8. Jenjang Kepengurusan PDI Perjuangan

Dalam Rangka melaksanakan Tugas Partai disusun jenjang kepengurusan sebagai berikut:

a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

- 1) Berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan partai, kekuasaan eksekutif puncak dipegang oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.
- 2) Keputusan kongres partai menentukan pemilihan dan penunjukan Dewan Pimpinan pusat.
- 3) Dewan Pimpinan Pusat Memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan baik internal maupun eksternal atas nama partai.

- 4) Berlandaskan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan kongres Dewan Pimpinan Pusat mengesahkan panduan dan regulasi partai untuk mengemban tugas-tugas partai.
- 5) Tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat disusun sebagai berikut:
 - a) Mengeksekusi serta mengadopsi pendekatan manajemen yang modern dalam pengelolaan partai.
 - b) Menyediakan arahan dan melakukan pengawasan terhadap beberapa anggota partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional.
 - c) Mengimplementasikan konsolidasi organisasi kader partai di tingkat kepemimpinan pusat.
 - d) Melaksanakan tugas-tugas eksekutif lain yang diperlukan.
 - e) Anggota Dewan Pimpinan Pusat, setelah terpilih dalam kongres partai, melakukan pengucapan sumpah atau janji pada saat kongres berlangsung.
 - f) Anggota Dewan Pimpinan Pusat harus mengutamakan peran dan kewajiban mereka sebagai pengurus partai. Jika seseorang anggota berhasrat mengejar posisi politik lain, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Rapat Dewan Pimpinan Pusat.
- 6) Struktur, komposisi, serta keanggotaan DPD dan DPC disahkan oleh DPP.

- 7) Penetapan para kader partai yang akan bertugas di berbagai lembaga negara atau organisasi nasional lainnya dilakukan oleh DPP.
 - 8) Pembentukan praksi oleh DPP diikuti dengan penunjukan pengurus fraksi yang akan bertugas di DPR/MPR-RI.
- b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
- 1) DPD bertindak sebagai entitas eksekutif di level regional partai
 - 2) Setelah terpilih melalui konferensi regional partai, anggota DPD melakukan pengambilan sumpah atau janji di hadapan konferensi regional tersebut.
 - 3) Wewenang dan kewajiban DPD mencakup:
 - a) Mengembangkan, mengukuhkan, serta merawat kepengurusan partai dalam wilayah kekuasaannya.
 - b) Mengukuhkan kesatuan dan persatuan seluruh elemen masyarakat serta anggota partai di wilayah tersebut.
 - c) Bertanggung jawab atas kepemimpinan, koordinasi, dan pengawasan terhadap DPC serta aktivitas partai pada level lokal.
 - d) Mengkonfirmasi struktur, susunan, dan anggota DPC dalam lingkup wilayahnya.
 - e) Menjalankan agenda kerja partai pada tingkat daerah.
 - f) Membangun fraksi dan menunjuk pengurus fraksi di DPRD Provinsi.

- g) Memberikan sanksi kepada anggota partai yang melanggar, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - h) Membuat keputusan untuk menarik petugas partai dari institusi pemerintahan daerah dengan persetujuan dari DPP partai.
 - i) Menyelenggarakan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab pada kongres daerah partai.
 - j) Menugaskan kader partai untuk berperan dalam lembaga pemerintahan atau organisasi lain di tingkat daerah.
- c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
- 1) DPC bertugas sebagai pengelola eksekutif pada tingkat cabang partai.
 - 2) Setelah terpilih dalam konferensi cabang, anggota DPC melakukan pengambilan sumpah atau janji jabatan di hadapan konferensi cabang tersebut.
 - 3) Wewenang dan kewajiban DPC mencakup:
 - a) Mendorong pertumbuhan, mengukuhkan, dan merawat pengelolaan organisasi partai di daerahnya.
 - b) Mengukuhkan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat serta anggota partai di lingkungannya.
 - c) Menjadi pemimpin dan kordinator bagi sub-cabang partai serta aktivitas partai di daerahnya.

- d) Memberikan pengesahan atas struktur, susunan, dan anggota pengurus partai di daerahnya.
- e) Menjalankan agenda kerja partai yang diterapkan untuk daerahnya.
- f) Membangun fraksi serta menunjuk pengurus fraksi partai di tingkat DPRD kabupaten/kota.
- g) Memberlakukan sangsi terhadap anggota partai yang melanggar berdasarkan AD/ART.
- h) Mengadakan konferensi cabang partai dan memberikan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban pada konferensi tersebut.
- i) Membuat keputusan untuk mencabut mandat perwakilan partai di institusi pemerintahan daerah dengan persetujuan dari DPD partai.

B. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan

1. Lokasi

Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan di kota Yogyakarta berlokasi di Jalan Balirejo Nomor 21, di area Muja Maju, dalam wilayah Kecamatan Umbulharjo, di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

Struktur Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta Masa Bakti 2019-2024, di Perpanjang Hingga 2025.

Tabel 2. 1 DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	: Eko Suwanto, ST, M.Si
2	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	: Subagyo
3	Wakil Ketua Bidang Kaderiasai dan Ideologi	: Andityas Bima Prasatya S.Kom
4	Wakil Ketua Bidang Organisasi	: Dwi Suryono
5	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	: GM. Deddy Jati Setyawan, SE
6	Wakil Ketua Bidang Komonikasi Politik	: Stanislaus K Loka Agustinto
7	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	: H. Masyhuri, S. Sos
8	Wakil ketua bidang ekonomi	: Tri Setiasih, A.Md
9	Wakil ketua bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	: Susantu Dwi Antoro, SE
10	Wakil Ketua Bidang Maritim	: Irma Susilowati
11	Wakil Ketua Bidang Buru, Tani dan Nelayan	: Indah Lestari
12	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	: Veronica Prabandari Tri Utami, SP
13	Wakil Ketua Bidang Komonikasi Seni Budaya, Pemuda dan Olaraga	: Yudha Santoso
14	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	: Darini, S. IP
15	Sekretaris	: FX. Wisnu Sabdono Putro, SH
16	Wakil Sekretaris Bidang internal	: Dody Puryanto
17	Wakil Sekretaris Eksternal	: R. Miko Pratenu Aryo
18	Bendahara	: Endro Sulaksono
19	Wakil Bendahara	: Sri Sugiyati

(Sumber: DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Masa Bakti 2019-2024)

3. Tugas Pokok Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta

- a. Tanggung jawab untuk menjaga keberadaan, program-program, serta kinerja internal dan eksternal partai pada level kabupaten/kota dipegang oleh ketua DPC partai.
- b. Tugas yang diemban oleh wakil ketua DPC partai mirip dengan tanggung jawab yang ditetapkan bagi ketua bidang di DPC partai, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga partai, khususnya pasal 17, 18, dan 19.
- c. Tanggung jawab sekretaris dan wakil sekretaris DPC partai setara dengan tugas yang harus dijalankan oleh sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal, sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan 21 dalam Anggaran Rumah Tangga.
- d. Bendarahara DPC memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan serta aset-aset DPC Partai.

4. Pemilu Legislatif di Kota Yogyakarta Tahun 2024

Pemilihan umum calon legislatif DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029, dibagi dalam lima dapil (dapil). Berikut adalah pembagian Dapil dan pembagian nama-nama caleg dari PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang diuraikan pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2. 2 Sebaran Dapil dan Nama-nama Caleg PDIP Kota Yogyakarta Periode 2024-2029

Dapil	Kecamatan	Nama Caleg
1	Umbulharjo Kota Gede	1. Subagyo 2. Sigit Nurcaahyo, S.H 3. Hari Prastawo Aditiya Putra 4. Yustinus Keliek Molyono, S.IP 5. Antonius Suhartono 6. Suharyanto
2	Mentrijeron Kraton Margangsari	1. Stanislius K Loka Agustinus 2. Tri Setiasi 3. Nuroryza Argo 4. Supsrni
3	Ngampilan Wirobrajan Gondomanan	1. Ipung Purwandasari, S.H 2. Rachmadani Enggar Sari, S.Pd. 3. Suryani, S.E., M.Si., Akt 4. Widiaryoko 5. Irma Susilowati
4	Tegalrejo Jetis Gendengtengen	1. Harjono 2. R. Miko Pratunu Aryo 3. Endro Sulaksono 4. Agus Riyanto
5	Gondokusuman Danurejan	1. Susanto Dwi Antoro, S.E 2. Irawati Diana Sari 3. Antonius Foki Ardiyanto, S.I.P. 4. Eko Haryanto, S.E., Akt 5. Valeni Endah Laksamawati, A.Md. A.K

sumber : Laman KPU Kota Yogyakarta

5. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024-2029

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta selalu mendapatkan suara atau kursi terbanyak dari pada partai politik lainnya. Berikut adalah hasil perbandingan pemilihan legislatif tahun 2024-2029 yang disajikan pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2. 3 Hasil Perbandingan Pemilihan Legislatif Tahun 2024-2029

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Perolehan Suara
1	PDIP	11 kursi	60.246
2	Gerindra	5 kursi	33.645
3	PKS	5 kursi	30.824
4	Golkar	5 kursi	24.104
5	PAN	4 kursi	21.146
6	Nasdem	4 kursi	19.466
7	PPP	4 Kursi	20.026
8	PKB	2 kursi	13.575

Sumber: Laman KPU Kota Yogyakarta

Dari hasil perolehan suara periode 2024-2029 PDI Perjuangan mendapatkan 11 kursi legislatif. Hal ini menandakan bahwa PDI Perjuangan berhasil menjaga basis massa dan kepercayaan masyarakat Kota Yogyakarta.

Berdasarkan rekap KPU Kota Yogyakarta, urutan perolehan suara pemilu legislatif 2024 terbanyak ditempati oleh PDI Perjuangan dengan 60.246 suara, kedua adalah Gerindra dengan 33.645 suara, lalu disusul oleh PKS 30.824 suara, Golkar 24.104 suara, PAN 21.146 suara, PPP 20.026 suara, Nasdem 19.466 suara, dan PKB 11.575 suara.

Tabel 2. 4 Nama-nama Caleg yang menjadi DPRD dari PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Periode 2024-2029

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1	FX. Wisnu Sabdono Putro, SH., M.H.	3.525 suara
2	Darini, S.IP.	1.520 suara
3	Susanto Dwi Antoro, S.E.	2.581 suara
4	Ipung Purwandaasari, S.H.	2.261 suara
5	Subagyo	1.743 suara
6	Endro Sulaksono	1.778 suara
7	H Danang Rudiyatmako, S.E.	2.377 suara
8	Sigit Nurcahyo, S.H.	1.458 suara
9	Haryanto, S.E.	2.585 suara
10	Agus Riyanto	1.467 suara
11	Novita Mawar Sharon	1.542 suara

Sumber: Laman KPU Kota Yogyakarta

BAB III PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN

Pada bab ini penulis akan membahas secara khusus tentang Pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan. Setelah pengumpulan informasi yang intensif dan beriteraksi langsung dengan narasumber, tahapan berikutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah mengolah data yang telah dikumpulkan, baik itu yang bersumber dari data utama maupun dari data pendukung. Tujuan dari proses pengolahan data ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap informasi yang telah diperoleh, sehingga memungkinkan penerikan kesimpulan mengenai proses pelembagaan PDI Perjuangan dalam mewujudkan demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan analitik yang diadopsi bersifat kualitatif, sesuai dengan metodologi yang telah dirinci dalam bab terdahulu. Proses analisis ini bergantung pada pemanfaatan jawaban dari narasumber sebagai fondasi utama, dengan tujuan menghasilkan interpretasi yang objektif berlandaskan pada fakta dan realita, melalui serangkaian pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

A. Penyajian Data dan Analisis

Secara esensial, analisis temuan berfungsi sebagai respon terhadap isi yang diangkat melalui pembahasan masalah. Masalah tersebut akan dieksplorasi dan ditafsirkan berdasarkan data yang dihimpun dan diobservasi di lapangan melalui teknik observasi, interview, dan pengumpulan dokumen.

Berdasarkan wawancara yang dijalankan oleh peneliti bersama responden yang dipilih, tema “Governing Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mewujudkan Demokrasi pada Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta”, menjadi pusat pembicaran. Melalui analisis terhadap informasi yang terkumpul, penguraian diarahkan sesuai dengan objek penelitian untuk menggali simpulan. Diskusi ini meliputi:

1. Struktural dan Fungsi Pelembagaan PDI Perjuangan Dalam Membentuk Pemerintahan

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Dody Purnanto (56 tahun), yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Internal Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Mei 2025, beliau mengungkapkan bahwa;

“Begini mas saya sebagai sekretaris internal DPC PDI Perjuangan saya melihat begini kalo kita berbicara kelembagaan saya melihatnya ada beberapa faktor memang untuk menjadi patokan terlembaganya sebuah organisasi pertama memulai dulu dari kedudukan sebuah organisasi, PDI Perjuangan ini kan partai besar kalau dikatakan ya mulai dari DPP, DPD, DPC, PAC, dan sampai ke ranting-ranting di Kaliurang dan RT/RW, artinya secara hirarki ini sudah terlihat secara jelas, kedua secara spesifik untuk DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, kalo saya begini mas, saya melihat dari kestabilan partai kami ini, mulai dari struktural yang stabil, kegiatan rutin, advokasi terhadap masyarakat, pengkaderan yang dilaksanakan setiap musim, penguatan ideologi, pengimplementasian fungsi partai terhadap masyarakat, dan berbagai kegiatan musiman yang dilaksanakan, ini mas nanti kan ini mau masuk bulan Bung Karno nanti ada perenungan setiap kader, perenungan ini bertujuan untuk selalu menjadi bahan evaluasi kinerja yang telah kita jalankan dan juga kegiatan kemasyarakatan yang sifat advokasi, dan pendidikan. Artinya kalo ditanya apakah DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sudah terlembaga dengan baik, saya bisa katakan sudah, kenapa saya bilang begitu karena saya sendiri ada di dalam melihat dan menyaksikan dinamikanya dan berbagai persoalannya”.

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Bidang Internal DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, jelas bahwa proses pelembagaan yang dilaksanakan di DPC PDI Perjuangan terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan yang telah diatur yang sesuai dengan AD/ART organisasi. Pelembagaan berlangsung di semua tingkatan mulai dari DPP sampai anak ranting, melibatkan metode pembinaan ideologi, penyusunan struktural, pengkaderan, advokasi, implementasi fungsi dan sampai pada pembiayaan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan organisasi yang terlembaga, bahkan hanya diukur dari lembaganya juga namun diukur dari kader yang berkualitas juga, yang siap ditempatkan sebagai pengurus atau pejabat publik.

Informasi yang sama disampaikan oleh Made Dwi Putra, berusia (66 tahun), yang menjabat sebagai Ketua Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, diperoleh melalui wawancara yang berlangsung pada 26 Mei 2025 di Sekretariat DPC PDI Perjuangan. Beliau menguraikan bahwa:

“Partai politik ini kan lembaga politik yang menghimpun anggota maupun masyarakat, jadi kita bicara tentang partai, pelembagaannya harus kuat dan harus memiliki regulasi internal yang menghimpun struktural, struktur atau pengurus partai ini menjadi basis atau penggerak suatu partai”.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada 26 Mei 2025, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, serta menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam masa bakti 2019-2024, dan terpilih lagi sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029,

oleh Endro Sulaksono, berusia (46 tahun). Menyampaikan pandangannya bahwa:

“Kalo ditanya bagaimana kebijakan partai mempengaruhi kebijakan pemerintah, begini mas kita ini kan sebelum bertarung sudah ada pembekalan dari internal itu sendiri yang sifat kepentingan umum atau masyarakat tidak boleh bertentangan dengan kebijakan partai, artinya kebijakan partai contoh advokasi, pendidikan politik pengawana dan banyak hal itu kita selalu pro aktif untuk betul-betul berjuang demi masyarakat dan ini juga mas kami ini kan DPRD setiap 3 bulan sekali kami selalu turun di masyarakat atas dengan pendapat di situ kami akan menghimpun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di setiap Dapil kami mas”.

Adapun hal berbeda yang disampaikan oleh Stanislaus K Loka Agustinus (52 tahun) selaku wakil bidang komunikasi politik dan juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025. Wawancara di ruangan Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi begi mas kalo mau berbicara terkait pelembagaan di PDI Perjuangan kita harus mulai dari strukturalnya dulu, artinya kalau kita bicara struktural yang pasti sudah melalui dinamika-dinamika, mulai dari DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting, dan Anak Ranting di lapisan masyarakat, artinya secara hirarki dan Struktural PDI Perjuangan, saya kirah begitu matang kalo kita berbicara terkait pelembagaan, terlepas kita berbicara struktural dan hirarki PDI Perjuangan yang pasti di dalam itu sendiri, ada tolak ukur lain dalam meletakkan pelembagaan ini mas, kalo kami di PDI Perjuangan ini untuk mendukung terlembaganya dengan baik kami ada penanaman ideologi, ini bertujuan untuk selalu menjadi sprirt perjuangan, artinya yang belum masuk ke partai PDI Perjuangan itu seluruh kader harus mengikuti proses pembelajaran, yang pertama sekola partai, dari tingkatan kader pratama, kader Madiaya dan kader utama yang suda melalui berbagai tingkat proses ini tidak semata-mata diikuti oleh semua kader bisa saja itu dari kalangan simpatisan, melalui pengkaderan sekolah partai sehingga dipersiapkan untuk menjadi menjadi kader yang militan”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Darini, S.IP (51 tahun) sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kepengurusan struktural DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dan juga sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025 beliau menyampaikan bahwa:

“Terkait pelebagaan kami sangat konsen sekali berbicara tentang penanaman ideologi hal itu bisa terlihat, dari susunan kepengurusan yang mewarnai dari sudut pandang yang beragam, artinya selalu konsen kita berbicara terkait pancasila sebagai dasar bernegara kita dan sebagai sprit perjuangan PDI Perjuangan juga. Untuk menopang kelembagaan PDI Perjuangan juga stabil dalam perekrutmen anggota dan proses perekrutmen ini melalui mekanisme-mekanisme yang sudah tertera di AD/ART”.

Dalam penuturannya Randall dan Svasad (2002), sebagaimana telah direview dalam tinjauan pustaka, bahwa pelebagaan partai politik adalah proses pemantapan baik secara struktural dalam rangka memperoleh perilaku maupun secara kultural dalam memperoleh sikap dan budaya, maka dalam hal ini peneliti menemukan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari warisan eksistensi PDI Perjuangan, pada suatu rezim orde baru sampai pada reformasi. Artinya secara struktural PDI Perjuangan memang sudah mapan, baik secara keorganisasian yang melengkapi kepengurusan hingga tingkat ranting maupun kemampuan dalam fungsi-fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, pendidikan politik, dan rekrutmen politik, hanya saja karena rezim orde baru waktu itu yang menggunakan pendekatan otoriterianisme, penggunaan intimidasi, manipulasi dan politisasi birokrasi yang mengakibatkan PDI-P pada masanya mengalami tresendental, namun tidak bisa dipungkiri bahwa

setelah rezim Soeharto lengser PDI-P kembali menunjukkan bahwa partai itu adalah partai besar. Maka PDI Perjuangan tampil sebagai partai yang banyak merebut simpatisan masyarakat.

Kemapanan secara struktural tersebut kemudian didukung oleh faktor kultural yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai yang membawa warna baru untuk seluruh Indonesia terkhususnya Kota Yogyakarta, secara sosiologis masyarakat Yogyakarta memiliki berbagai latar belakang, ditambah dengan pelabelan Kota Pendidikan, partai PDI Perjuangan diyakini sebagai partai yang membawa warna baru untuk kemajuan daerah tersebut. Keterkaitan antara sosiologis dan identitas Kota Yogyakarta yang penuh warna, dengan berdirinya PDI Perjuangan, memiliki simbol wong cilik yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Jadi antara faktor struktural dan kultural akan mendominasi PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari perseteruan kedua faktor tersebut, antara faktor struktural dan faktor kultural sama-sama saling mengisi, mempengaruhi satu sama lain, dan tidak bisa dikatakan mana yang duluan lahir.

Dari dua elemen yang saling berkaitan tersebut, maka setelah reformasi PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta mampu mendominasi dari eksekutif maupun legislatif, sehingga menjadi fraksi mayoritas di DPRD. Walaupun setelah reformasi banyak partai yang berhaluan nasionalis, yang sama-sama memiliki konsep perjuang nasionalis, tidak membuat partai PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta mengalami kesulitan.

Sebagai partai kader PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta memiliki pengaruh individu itu sendiri terhadap penanaman ideologi sering mengalami pertengkaran, hal yang lumrah terutama dalam dinamika politik. Dalam pendidikan kader keberagaman tersebut menjadi nilai positif yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan partai, dengan mendatangkan idealisme dari kader yang sedemikian tersebut, maka partai akan mampu membentengi kader-kadernya dari kecenderungan penyimpangan-penyimpangan di masa depan. Dengan demikian penerapan strategi pendidikan kader yang dijalankan oleh PDI Perjuangan Khususnya di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan silabus kaderisasi dan visi partai PDI Perjuangan sudah berjalan dengan baik. Untuk melihat sejauh mana pelebagaan melalui kaderisasi itu tercapai kader-kader dan calon kader ditempatkan di basis rakyat serta politik gerilya. Gerilya politik dilaksanakan dengan menerjunkan fraksi PDI Perjuangan langsung di tengah masyarakat. Pada dasarnya untuk mencapai pelebagaan harus memerlukan pengakuan, untuk itulah diterjunkan kaderisasi informal untuk merasakan langsung situasi dan kondisi yang sedang masyarakat alami dan untuk mencapai kaderisasi yang formal harus melalui terjun langsung di masyarakat, sehingga kaderisasi informal ini lebih menargetkan masyarakat awam yang cenderung politiknya masih abu-abu. Pelaksanaannya para kader yang telah terdidik oleh partai untuk meneruskan ideologi hingga sampai pada masyarakat. Upaya tersebut untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap partai dengan menghadirkan orang-orang yang telah

terpilih untuk membantu serta mengangkat persoalan di tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, fokus yang dibangun oleh partai adalah edukasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh yang dipilih masyarakat untuk hadir di tengah masyarakat, dengan begitu masyarakat akan merasa bahwa partai ada untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses pelebagaan PDI Perjuangan telah terimplementasi efektif sejalan dengan aturan yang tertuang dalam AD/ART partai tersebut. PDI Perjuangan tetap berkomitmen pada metode pembinaan kader yang sistematis dan terstruktur, yang berawal dari tingkat terendah yakni anak ranting hingga ke pengurus pusat. Konsistensi ini memungkinkan partai untuk mengembangkan anggota berpotensi yang mampu berkontribusi baik internal maupun di kancah kepemimpinan nasional. PDI Perjuangan menekankan pada pembentukan kader melalui dua pendekatan utama: pendidikan formal dalam kelas untuk materi teoritis, dan pelatihan lapangan yang mengutamakan interaksi serta integrasi langsung dengan masyarakat. Pendekatan ini untuk membutuhkan dedikasi kader terhadap kemajuan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam proses pelebagaan PDI Perjuangan melalui prosedur yang ditetapkan sudah dilaksanakan ini dapat dilihat bertambahnya kader-kader PDI Perjuangan setiap tahunnya, dan juga terus berupaya membangun basis, akar rumput melalui kaderisasi non

formal untuk basis massa dalam upaya mendukung keberlangsungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. Nilai dan Norma Pelembagaan PDI Perjuangan dalam Membentuk Pemerintahan

Dalam sesi wawancara yang diadakan di Gedung Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Mei 2025, oleh Dody Purnanto berusia (56 tahun), dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Internal di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Beliau memberikan penjelasan mengenai hal tersebut:

“Kader yang ditugaskan di DPRD Kabupaten/Kota minimal kader Pratama, itu kaderisasi yang dilakukan di tingkat DPC PDI Perjuangan menuju kader pratama ada rangking yang diatur di dalam silabus kaderisasi lalu kader Madya penugasannya di DPRD Provinsi lebih detail lagi dalam penugasan serta untuk lulus menjadi Madya itu lebih berat senangkan kader-kader utama/nasional seperti DPR RI harus kader Nasional selain itu, ada juga kader-kader informal sesuai kebutuhan partai”.

Dilanjutkan oleh Made Dwi Putra yang berumur (66 tahun), dan menjabat sebagai Ketua Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, juga menyampaikan hal yang serupa. Dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2025, beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi begini mas saya ini kan hampir 25 tahun berada di DPC PDI Perjuangan saya sendiri mengalaminya bahwa pengkaderan itu mulai dari bawah dari anak ranting, ada kordes-kordes lalu korcam, untuk kebijakan atau penentuan kader-kader yang berkontestasi ada parameternya sendiri atau penyeleksian untuk yang legislatif dan eksekutif, kalau untuk yang legislatif harus miniml kader yang telah menyelesaikan pengkaderan Pratama dan sudah masuk dalam pengurusan DPC”.

Endro Sulaksono yang berusia (46 tahun), dan menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta serta sebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta, juga mengungkapkan pandangan serupa. Dalam sebuah wawancara yang dilaksanakan di Gedung Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 26 Mei 2025, beliau memberikan penjelasan mengenai hal tersebut:

“Kami ditugaskan oleh partai dan sekaligus menjadi petugas partai kami bangga bahwa petugas yang dimaksud ini adalah melaksanakan konstitusi dan menjadi pelayan masyarakat. Maka, setiap kader yang ditugaskan telah melewati proses dan telah memenuhi syarat di dalam internal partai, jika dia ingin di legislatif maupun eksekutif”.

Berdasarkan pernyataan ketiga pengurus DPC PDI Perjuangan di atas, dari setiap kader partai yang ditugaskan melalui pengambilan kebijakan dari DPP melalui Ketua Umum. Maka secara mekanisme telah mengikuti kaderisasi berdasarkan jenjang pratama, madya, dan utama dari ketiga jenjang tersebut memiliki batas-batas dan syarat yang tidak boleh dilanggar. Namun pada praktiknya PDI Perjuangan juga menyesuaikan kebutuhan partai dan keputusan politiknya dalam artinya akan menggandeng seseorang yang dianggap mampu dan bertanggung jawab melaksanakan tugas. Akan tetapi semua keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah dan intruksi Ketua Umum.

Hal berbeda yang disampaikan oleh Stanislaus K Loka Agustinus (52 tahun) selaku Wakil Bidang Komunikasi Politik dan juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Wawancara

pada tanggal 2 Juni 2025. Wawancara di ruangan Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Beliau menjelaskan bahwa:

“PDI Perjuangan dalam setiap ifen 5 tahun entah itu pemilu maupun iven-iven yang mengangkat kader, jadi partai PDI perjuangan sejak awal kader-kader yang akan kita pasang dalam posisi-posisi entah itu pemerintahan entah itu pencalegkan, pilkada, polpres, PDI Perjuangan melihat bahwa seluruh kadernya yang ada di wilayah dimonitor oleh DPP jadi DPP itu mempunyai satu pola yang memang berbeda sehingga monitoring di tingkat bawah, jadi kader-kader ini memang dimanage oleh DPP tidak semata-mata seluruh kader PDI Perjuangan yang ingin menduduki entah itu di legislatif maupun eksekutif, itu memang sudah menjadi prioritas rekrutan yang mempunyai prestasi ataupun jadi skoring yang menjadi catatan DPC yang tidak bisa dibantah oleh siapapun”.

Padangan berbeda disampaikan oleh Stanislaus K Loka Agustinus bahwa yang menjadi prioritas atau *privillage* di PDI Perjuangan adalah pengurus-pengurus di dalam struktur DPC, DPD dan DPP seperti ketua, sekretaris, dan bendahara dan wakabid merupakan kader yang dicalonkan di setiap dapilnya atau ditentukan oleh partai melalui penugasan. Namun dalam pencalonan eksekutif ini menjadi persoalan karena mempunyai konsep yang matang sehingga membuat partai mengumumkan skema dalam menentukan dukungan serta membaca arah politik secara nasional.

Adapun hal berbeda yang disampaikan oleh Darini, S. IP (51 tahun) sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kepengurusan struktural DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dan juga sebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025 beliau menyampaikan bahwa:

“Yang menjadi tolok ukur kami jelas sesuai dengan AD/ART partai yaitu telah melewati proses yang berlaku di dalam partai seperti jenjang kaderisasi, berjiwa kerakyatan, berjiwa nasionalis, bisa

mengamalkan Pancasila dan tentunya membela kepentingan rakyat. Jika melakukan rekrutmen politik untuk jabatan-jabatan politik maka kami tidak hanya berbicara uang akan tetapi kapasitas kader dan asa gotong royong serta dukungan partai kami. Karena pandangan kami untuk menambah tenaga kaum marhaen untuk berbicara kepentingan-kepentingan rakyat dan bangsa. Nah yang menjadi opini sekarang adalah etika dan moral tetapi bagi kami etika dan moral adalah hal yang paling dasar dan tidak boleh diabaikan namun itu tergantung dari diri setiap kader”.

Kebijakan di dalam partai tentu tidak terlepas dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDI Perjuangan, yang termaktub dalam pasal 7 dan, 8.

Penugasan di Lembaga Legislatif:

- a. Anggota partai yang ditugaskan di lembaga legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, agar kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan program perjuangan partai.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota partai untuk ditugaskan di lembaga legislatif diatur dengan peraturan partai.

Penugasan di Lembaga Eksekutif:

- a. Anggota partai yang bertugas di Lembaga Eksekutif melaksanakan fungsi eksekutif pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan program perjuangan partai.
- b. Anggota partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala

Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan program perjuangan partai.

- c. Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan sekurang-kurangnya 2 kali selama masa bakti DPP Partai.
- d. Rapat DPP partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka kordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan strategi program pembangunan antara pemerintah, pemerintah daerah dan partai.
- e. Anggota partai yang bertugas sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Menteri dan/atau Wakil Menteri dikoordinasikan secara khusus oleh ketua umum partai.
- f. Anggota partai yang akan ditugaskan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dikoordinasikan oleh DPP partai melalui bidang pemerintahan.
- g. Anggota partai yang akan ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogratif ketua umum partai.
- h. Anggota partai yang ditugaskan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan partai

Kebijakan yang terdapat di pasal 7 dan 8 di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, sudah cukup jelas bahwa peran dan hak prerogratif seorang Ketua Umum sangat kuat. Maka dalam penugasan setiap kader di Lembaga Legislatif dan Eksekutif harus melewati mekanisme yang menjadi acuan di dalam partai. Pada poin di atas

menegaskan bahwa PDI Perjuangan dalam pengambilan keputusan semi terpimpin. Hal mendasar inilah maka, setiap kader yang ditugaskan harus betul-betul menjalankan nawa-cita partai dan kepentingan rakyat, sehingga menjadi dasar dalam melaksanakan konstituen partai untuk bangsa dan negara. Dengan demikian, berdasarkan AD/ART partai seluruh kader taat terhadap kebijakan dan tegak lurus terhadap pemerintah.

Dalam pengambilan keputusan di PDI Perjuangan tidak terlepas dari sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yang memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan PDI Perjuangan sebagai salah satu partai besar di Indonesia, sebagai pemimpin organisasi sosoknya mampu menginspirasi dan memotivasi anggota partainya serta memperoleh dukungan dari masyarakat. Salah satu aspek kunci kepemimpinan ala Megawati Soekarnoputri adalah kharisma yang dimilikinya. Kharisma adalah daya tarik dan pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang membuat orang lain terpicu dan termotivasi untuk mengikutinya. Megawati telah berhasil membangun kharismanya melalui keseharian yang tegas, kepribadian yang kuat, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada kader partai maupun basis pendukungnya. Selanjutnya dengan pengalamannya sebagai politisi senior, membuat kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menonjol dan memiliki jejaring politik yang luas serta kemampuan untuk memanfaatkan aliansi dan kerjasama politik untuk mencapai tujuan-tujuan partainya. Selama kepemimpinan di PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri membangun kharisma dan popularitas

yang besar dengan kemampuan berbicara yang tulus serta menyentuh aspirasi rakyat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dalam internal partai PDI Perjuangan, walaupun keputusan yang diambil menimbulkan perbedaan pandangan politik setiap kader, namun dengan sosok Megawati Soekarnoputri mampu meredam dan menyelesaikan setiap sekat-sekat yang ada, sehingga ketokohnya di PDI Perjuangan masih sangat dibutuhkan dalam menyatukan watak kader-kader yang berbeda untuk tujuan partainya.

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa kebijakan penentuan kader PDI Perjuangan di Legislatif dan Eksekutif sudah sesuai dengan AD/ART partai dapat dilihat bahwa kader yang dicalonkan adalah kader yang telah memenuhi syarat dan kriteria minimal mengikuti kaderisasi pertama bagi calon legislatif kabupaten/kota, calon legislatif provinsi minimal madya, dan calon legislatif pusat telah mengikuti kaderisasi utama/nasional. Akan tetapi bukan hanya jenjang kaderisasi saja yang menjadi tolok ukur, ada juga tolok ukur lain seperti sifat kerakyatan, ideologis, berkapasitas dan mempunyai basis massa, selain itu ketua-ketua, sekretari dan bendahara dalam struktural mendapatkan prioritas untuk mencalonkan dan tidak boleh ditolak karena menjadi keputusan partai. Namun di PDI Perjuangan sendiri yang menjadi pengambil keputusan adalah DPP melalui Ketua Umum karena DPC dan DPD hanya sebatas memberikan rekomendasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan semi terpimpin sebagai pemberi mandat untuk berkontestasi. Dalam pengambil

kebijakan juga diperhatikan kesimbangan gender untuk pemenuhan kuota 30% serta berlaku adilnya sebuah partai dalam arah perjuangan.

3. Menejemen Organisasi PDI Perjuangan dalam Pembentuk Pemerintahan

Made Dwi Putra, berusia (66 tahun), yang menjabat sebagai Ketua Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, diperoleh melalui wawancara yang berlangsung pada 26 Mei 2025 di sekretariat DPC PDI Perjuangan. Beliau menguraikan bahwa;

“Tantangan dan peluang di PDI Perjuangan sudah memiliki planning jauh-jauh hari sebelum menghadapi hal-hal yang bersifat urgen, apapun itu kita rapat dalam internal dulu, misalnya kita lagi bicara tentang kegiatan yang membutuhkan pembiayaan, contoh dalam pelaksanaan kederisasi yang mana kita kegiatan tiga hari yang pasti membutuhkan perencanaan yang baik”.

Dalam sesi wawancara yang diadakan di Gedung Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, pada tanggal 26 Mei 2025, oleh Dody Purnanto berusia (56 tahun), dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Internal di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Beliau memberikan penjelasan mengenai hal tersebut:

“Secara relatif di internal PDI Perjuangan kalo kita berbicara terkait faktor pendukung, memiliki komitmen atau arah perjuangan yang sudah kita sepakati di setiap agenda yang kita jalankan contohnya nanti bulan Juni ini kan bukuan Bung Karno kita di internal sudah memiliki planning contoh kita mau turun di masyarakat untuk mengajak diskusi kicilan-kecilan ini sering dilaksanakan di bulan Juni, artinya secara kelembagaan dalam arti untuk mendukung kestabilan kepercayaan masyarakat terhadap partai, khususnya di PDI Perjuangan itu sendiri. Foktor penghambat itu secara internal dan eksternal kalo di internal masih mengandung ketidak puasan anggota yang lain dalam pengambilan keputusan, contoh yang lagi booming waatu itu terkait keluarnya Jokowi, Gibran, dan Budiman Sujatmiko itu kan, salah satu ketidakpuasan ketika kebijakan tidak

menguntungkan mereka. Ya walaupun belum semaksimal mungkin yang namanya partai ada yang suka dan ada yang tidak suka mas, itu bagian dari dinamika sendiri ya, kalo kita bicara tantangan hari ini mas, banyak sekali faktornya mulai dari konflik internal yang di pusat maupun internal di DPC sendiri mas, jadi ini semua sudah biasa dalam dinamika politik”.

Pernyataan serupa yang disampaikan oleh Endro Sulaksono yang berusia (46 tahun), dan menjabat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta serta sebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta, juga mengungkapkan pandangan serupa. Dalam sebuah wawancara yang dilaksanakan di Gedung Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 26 Mei 2025, beliau memberikan penjelasan mengenai hal tersebut:

“Sama seperti yang dikatakan sebelumnya oleh kader-kader senior bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelebagaan PDI Perjuangan itu sudah memiliki planning jauh-jauh hari dan azas gotong royong. Cara-cara inilah yang kami pakai sehingga partai kami dalam melaksanakan kegiatan terus berjalan walaupun tidak semudah apa dibayangkan. Asas gotong royong betul-betul kami terapkan sebagai kader untuk memaksimalkan kerja-kerja organisasi”.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa anggota PDI Perjuangan terkait mengantisipasi kendala internal maupun eksternal dalam sistem pelebagaan telah diantisipasi melalui *plaining* jauh-jauh hari dan melakukan pembacaan situasi. Selanjutnya rapat musyawarah yang ditempuh merupakan ruang pengambilan keputusan bersama berdasarkan pertimbangan yang matang. Hal inilah yang menjadi landasan utama bagi PDI Perjuangan dalam mengantisipasi kendala yang ada dalam internal. Adapun setiap keputusan yang diambil memiliki pro dan kontra, sehingga menimbulkan perpecahan di internal, PDI Perjuangan selalu

mengedepankan asas gotong royong sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Adapun hal berbeda yang disampaikan oleh Stanislaus K Loka Agustinus (52 tahun) selaku Wakil Bidang Komunikasi Politik dan juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025. Wawancara di ruangan Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Beliau menjelaskan bahwa:

“Hari ini kalo kita berbicara terkait ketidakpercayaan masyarakat terutama Gen Z, terhadap partai sangat gagap sehingga partai politik dianggap penuh keonaran terapi orang harus sadar bahwa semua perlakuan sosial masyarakat secara politis itu yang harus disadari bahwa kebijakan-kebijakan di daerah itu diambil melalui kebijakan politik baik bupati dan lembaga-lembaga terkait ini yang perlu disadarkan sehingga untuk membentuk sekolah kader untuk melakukan fungsinya itu menjadi tantangan selama ini apalagi kader yang lompat-lompat itu karena pembentukannya tidak sesuai standarisasi lalu orang beranggapan bahwa nanti mencalonkan diri karena ada uang. Untuk mengatasi terkait faktor-faktor yang menjadi pengambat kami di PDI Perjuangan memiliki sekolah partai ini yang memungkinkan bagi generasi muda untuk belajar betul-betul mengenai politik atau partai politik, di sisi lain kami sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta membuka sekolah parlemen ini untuk mendidik generasi muda dalam jangka panjang sehingga ketika suatu saat nanti mereka ingin berkecimpung di dalam dunia politik mereka sudah memiliki pandangan”.

Pernyataan berbeda di atas yang disampaikan oleh Stanislaus K Loka Agustinus terkait PDI Perjuangan dalam mengatasi faktor-faktor yang selalu bermuculan di masyarakat terutama anak muda memandang partai politik selalu pada kekuasaan, maka dalam memperbaiki citra PDI Perjuangan anggota partai telah berinisiatif membuat sekolah parlemen di

setelah sudah memiliki sekolah partai artinya di tingkat daerah harus membuka sekolah yang memang konsen terhadap dunia politik.

Pemungutan-pemungutan lembaga non-formal yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan selama menjadi pejabat publik, ini memberikan kesan positif dalam upaya menjalankan fungsi kader dan partai. Di sisi lain, terobosan-terobosan baru yang telah dilakukan merupakan langkah-langkah konkrit untuk membendung persepsi publik terhadap partai politik yang akhir-akhir ini mengalami kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi partai politik di Indonesia. Tentu harapan-harapan kegiatan non-formal terus dilakukan sebagai bentuk insiatif kader dalam memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat, dengan begitu secara tidak langsung akan membantu PDI Perjuangan mendidik regenerasi yang akan datang untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dan arah perjuangan PDI Perjuangan di masa depan.

Wawancara yang dilakukan di gedung Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, oleh Darini, S. IP (51 tahun) sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kepengurusan struktural DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dan juga sebagai Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025 beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk mengatasi hal-hal yang ada di masyarakat, apalagi kami PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sebagai partai pemenang jadi kami membentuk namanya tiga pilar yaitu Legislatif, Eksekutif dan Struktur. Ini adalah upaya untuk mengurangi stigma di masyarakat

sehingga kami ketika setiap kebijakan yang mau diambil harus betul-betul pro terhadap rakyat”.

Kegiatan yang dilakukan PDI Perjuangan selama ini cenderung pada pembahasan internal dalam mengantisipasi kendala-kendala yang ada. Fungsi hegemoni atau kepemimpinan politik yang diuji oleh partai-partai dinilai dari evolusi kehidupan internal partai sendiri (Gramsci dalam Santosa, 2018). Usaha partai politik dalam memenangkan pemilu. Partai politik mengarahkan seluruh kekuatan politiknya untuk meraih kekuasaan. Dengan adanya garis-garis wilayah, maka partai politik telah menetapkan basisnya dan fokus program kerjanya sebagai langkah-langkah untuk memikat suara hati masyarakat secara luas, pendidikan politik merupakan hal fundamental bagi partai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, namun di setiap daerah memiliki ciri khas bahkan karakter individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda, hal inilah dalam menciptakan ideologi yang selaras dengan PDI Perjuangan kurang optimal. Kerja keras partai dalam pendidikan politik harus dimaksimalkan untuk menciptakan kader yang ideal begitupun di Kota Yogyakarta.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi faktor pendukung maupun penghambat di dalam PDI Perjuangan sudah cukup baik. PDI Perjuangan membuat *planning* yang matang dan jauh-jauh hari, seperti anggaran itu dikumpulkan melalui gotong royong, DPP dan anggota legislatif dalam mendukung keberlangsungan kegiatan keorganisasian. Setiap kegiatan yang mendukung kestabilan kelembagaan yang dilaksanakan cenderung tidak

memiliki penghambat yang cukup serius, karena telah dimusyawarahkan bersama sebagai bentuk tanggung jawab bersama kader dan partai. Selanjutnya yang masih menjadi perhatian PDI Perjuangan selama ini proses pelebagaan yang dilakukan terbilang efektif sehingga persepsi anak mudah terhadap partai politik. Kendala yang dihadapi oleh PDI Perjuangan adalah persepsi masyarakat terhadap kader-kader yang menduduki jabatan justru tidak menggunakan fungsinya secara baik sering sekali membuat kebijakan maupun keputusan yang blunder sehingga memunculkan stigma masyarakat terhadap partai terkesan negatif, justru mempengaruhi partai-partai di daerah dalam melakukan kerja-kerja organisasi. Hal inilah yang membuat PDI Perjuangan belum optimal dalam menarik simpati anak mudah secara keseluruhan untuk terlibat maupun menjadi kader. Dengan demikian, sifat keterbukaan, kreatifitas, serta inovasi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menarik simpatisan masyarakat, ini perlu ditingkatkan dalam upaya membangun basis partai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam analisis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa proses Pelembagaan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, secara efektif berlangsung sesuai dengan kerangka silabus dan AD/ART yang telah ditetapkan oleh partai tersebut. Hal ini diperkuat oleh bukti-bukti yang ditemukan dalam lingkup penelitian ini, dimana:

1. Struktural dan Fungsi Pelembagaan PDI Perjuangan dalam Membentuk Pemerintahan

proses pelembagaan di PDI Perjuangan telah terlembaga dengan baik mulai dari terstruktur dengan rapi, terbukti melalui mekanisme perekrutmen yang selaras dengan aturan AD/ART partai tersebut. Konsistensi partai dalam mengembangkan kader secara bertingkat, mulai dari tingkat anak ranting hingga ke DPP, menjadikan PDI Perjuangan berhasil menumbuhkan kader yang berpotensi, tidak hanya untuk kepentingan internal tetapi juga dalam arena kepemimpinan nasional. Untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas tentunya sistem/mechanisme yang dibangun baik dari segi pola pelembagaan, penguatan ideologi yang diyakini sebagai dasar nilai dalam perjuangan, maupun struktur yang efektif. Dalam proses pelembagaan PDI Perjuangan telah melalui prosedur yang ditetapkan dan sudah dilaksanakan, ini dapat dilihat bertambahnya kader-kader DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta setiap tahunnya, dan

terus berupaya membangun basis akar rumput melalui kaderisasi non-formal untuk pemungutan basis massa dalam upaya mendukung keberlangsungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

2. Nilai dan Norma pelembagaan PDI Perjuangan dalam membentuk pemerintahan

Kebijakan PDI Perjuangan dalam penentuan kader-kader yang akan berkontestasi di Legislatif dan eksekutif, sudah sesuai dengan AD/ART partai. Dapat dilihat bahwa kader yang dicalonkan adalah kader yang telah memenuhi syarat dan kriteria minimal mengikuti kaderisasi pertama bagi calon legislatif kabupaten/kota, calon legislatif provinsi minimal madya, dan calon legislatif pusat telah mengikuti kaderisasi utama/nasional. Akan tetapi bukan hanya jenjang kaderisasi saja yang menjadi tolak ukur ada juga tolak ukur lain seperti sifat kerakyatan, pemahaman ideologi, berkapasitas dan mempunyai basis massa, selain itu juga ketua-ketua, sekretaris dan bendahara dalam struktural mendapatkan prioritas untuk mencalonkan dan tidak boleh ditolak sudah menjadi ketentuan partai. Namun dalam PDI Perjuangan sendiri yang menjadi pengambil keputusan adalah DPP melalui Ketua Umum karena DPC dan DPD hanya sebatas memberikan rekomendasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan semi terpimpin sebagai pemberi mandat untuk berkontestasi adalah ketua umum. Lalu dalam pengambilan kebijakan juga diperhatikan keseimbangan gender untuk pemenuhan kuota 30% serta berlaku adilnya sebuah partai dalam arah perjuangan. Selanjutnya keberlangsungan Trah Soekarno di dalam tubuh

partai memberi kesan bahwa mereka mempunyai hak patriot dan *priviallage* tersendiri walaupun tetap mengikuti mekanisme yang berlaku di dalam PDI Perjuangan.

3. Menejemen Organisasi PDI Perjuangan dalam pembentuk pemerintahan

Langka yang dilakukan dalam mengantisipasi faktor pendukung maupun penghambat di dalam PDI Perjuangan sudah cukup baik hal ini dapat dilihat ketika membuat *plaening* jauh-jauh hari, seperti anggaran yang dikumpulkan melalui gotong royong kader, DPP dan anggota fraksi partai dalam mendukung keberlangsungan kegiatan kaderisasi, pendidikan, dan penguatan ideologi. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki faktor penghambat cenderung dalam internal itu sendiri masih adanya saling ketidakpercayaan, egosentris, dan skeptis dalam menjalankan kegiatan. Sedangkan dilihat dari faktor eksternal, banyak kalangan yang tidak percaya lagi terhadap partai politik terutama generasi muda memandang partai politik hanya menginginkan kekuasaan dari pada tujuan utama partai politik itu sendiri karena cenderung eksklusif. Hal ini yang mengindikasikan bahwa partai politik tidak disukai khususnya anak muda. Maka dalam prosesnya PDI Perjuangan belum optimal dalam menarik simpatisan anak muda secara keseluruhan untuk terliabat maupun menjadi kader. Dengan demikian, sifat keterbukan, kreatifitas, serta inovasi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menarik simpatisan masyarakat ini perlu ditingkatkan upaya membangun basis partai.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa saran yang penulis anggap dapat berkontribusi terhadap pembangunan struktur pelebagaan PDI Perjuangan. Khususnya dalam proses pelebagaan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pembinaan kader, DPC PDI Perjuangan di Kota Yogyakarta diharapkan selalu mengacu pada silabus dan AD/ART partai. Penting juga untuk mengembangkan nilai-nilai kultural di dalam organisasi, sehingga setiap anggota merasakan hak dan keterikatan yang sama terhadap partai.
2. Pemilihan kader oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta harus berdasarkan pada keputusan musyawarah partai dan arahan DPP, serta pengalaman dalam jenjang kaderisasi. Penting juga untuk mempertimbangkan rekam jejak, ideologi, dan sifat yang pro rakyat untuk memastikan representasi yang autentik terhadap visi partai bagi masyarakat kecil.
3. DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta diharapkan meningkatkan kretivitas dan inovasi dalam sosialisasi tanpa terlalu bergantung pada DPP. Kegiatan yang bersifat intraktif dan langsung bersentuhan dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal:

- Alfirdaus, L. K. (2019). Dari Identitas Ke Ideologi: Penguatan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 99-108.
- Hakim, Moch Agung Lukmanul, Cecep Darmawan, And Leni Anggraeni. "Demokrasi Minim Oposisi: Narasi Maha Puitis Sejarah Atas Reduksi Oposisi." *Jurnal Education And Development* 10.3 (2022): 674-683.
- Hidayat, Amri Wahid, Ari Ganjar Herdiansyah, And R. Widya Setiabudi Sumadinata. "Peran Elite Dalam Rekrutmen Eks-Kombatan Gerakan Aceh Merdeka Dan Dampaknya Terhadap Pelembagaan Partai Aceh Pasca Pemilu 2019." *Journal Of Political Sphere* 2.1 (2021): 1-14.
- Khadri, L., Rusta, A., & Valentina, T. R. (2022). Permasalahan Pelembagaan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi-P) Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2022 Problems Of Political Institution Indonesian Democracy Party Of The Struggle (Pdi-P) In West Sumatra Province 2019-2022 Period. *Jurnal Suara Politik*, 1(2).
- Mahardika, A. G. (2019). Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2).
- Rachmayani, Irma, Dan Arizka Warganegara. "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9.2 (2023): 389-398.
- Ristyawati, Aprista. "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Sistem Demokrasi." *Jurnal Hukum Administrasi Dan Pemerintahan* 2.4 (2019): 710-120.
- Saputri, W. J. (2021). Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Padang Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(1), 1-12.
- Sugiyono, P. D. "Metode Peneliiian." *Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2018).
- Suryana, Nanang, Ari Ganjar Ardiansyah, And Firman Manan. "Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019." *Jurnal Civic Hukum* 5.1 (2020): 52-61.
- Usboko, I. Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi.

Yunanto, Sutoro Eko. "Ilmu Pemerintahan: Anti Pada Politik, Lupa Pada Hukum, Dan Enggan Pada administrasi." *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 1.1 (2020): 1-24.

Sumber Peraturan:

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024.

Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2011 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Sumber Buku:

Amal, Ichlasul (2012). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Budiardjo, Miriam. (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pamungkas, Sigit (2011). *Partai Politik: Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Yogyakarta 2011: Institute For Democracy Dan Welfarism.

Randall, Vicky, Dan Lars Svåsand. "Pelebagaan Partai Dalam Demokrasi Baru." *Politik Partai* 8.1 (2002): 5-29.

Sumber Internet:

[https://Nasional.Kompas.Com/Read/03080021/Defenisi-Partai-Politik-Menurut-Ahli-Dan-Undang-Undang.\(23/08/2022\).](https://Nasional.Kompas.Com/Read/03080021/Defenisi-Partai-Politik-Menurut-Ahli-Dan-Undang-Undang.(23/08/2022).)

[https://Www.Kompas.Id/Baca/Riset/Pdi-P-Menjaga-Kuat-Ideologi-Partai.\(25/03/2024\)](https://Www.Kompas.Id/Baca/Riset/Pdi-P-Menjaga-Kuat-Ideologi-Partai.(25/03/2024))

[https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/1161408/Pompa-Semangat-Kader-Di-Yogyakarta-Sekjen-Pdip-Gerakan-Pdip-Berpihak-Pada-Sejarah-Yang-Benar.\(13/03/2024\).](https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/1161408/Pompa-Semangat-Kader-Di-Yogyakarta-Sekjen-Pdip-Gerakan-Pdip-Berpihak-Pada-Sejarah-Yang-Benar.(13/03/2024).)

[https://Www.Berdikarioneline.Com/Bung-Hata-Dan-Pengikutnya-Kaderisasi-Partai/#Gogle-Vignette.\(20/03/2024\)](https://Www.Berdikarioneline.Com/Bung-Hata-Dan-Pengikutnya-Kaderisasi-Partai/#Gogle-Vignette.(20/03/2024))

LAMPIRAN

Lampiran 1: Ringkasan Data

No	Jenis	Kegunaan dalam analisis	Sasaran subjek
1.	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami proses kinerja kader PDIP dalam menghadapi konflik internal-eksternal - Faktor-faktor penghambat dalam mendudukan kader yang diutus dalam mengikuti kontestasi elektoral - Memahami pembiayaan dalam tubuh partai PDIP - Memahami proses pengorganisasian dalam tubuh organisasi PDIP - Memahami hubungan struktural yang dijalankan oleh PDIP mulai dari pusat sampai ke ranting-rantingnya - Memahami dinamika demokratisasi dalam tubuh PDIP - Memahami proses pengambilan keputusan dalam instansi pemerintahan yang dipengaruhi oleh partai PDIP - Memahami stabilitas antara partai dan simpatisan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Kaderisasi - Staf
2.	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Berupa surat menyurat yang perlu untuk data skripsi - AD/ART PDIP - File-file yang diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian pelayanan
3.	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamati proses yang dilaksanakan di kantor DPC PDIP Kota Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Kader DPC PDIP Kota Yogyakarta

Lampiran 2: Panduan Wawancara Penelitian

A. Sistim pelebagaan PDI Perjuangan dalam mewujudkan demokrasi.

1. Bagaimana PDI Perjuangan dapat berfungsi sebagai lembaga yang efektif dalam mewujudkan demokrasi?
2. Bagaimana PDI Perjuangan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi
3. Bagaimana PDI Perjuangan dapat memastikan transparansi keuangan partai?
4. Bagaimana PDI Perjuangan dapat mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi dalam proses demokrasi?
5. Langkah-langka yang diambil oleh PDI perjuangan dalam memperbaiki sistim pelebagaan?
6. Bagaimana mekanisme PDI Perjuangan dalam mewujudkan fungsi partai politik?
7. Bagaimana PDI Perjuangan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah?

B. Kebijakan lembaga PDI Perjuangan dalam penentuan kader-kader yang akan berkontestasi dalam pemilihan.

1. Bagaimana PDI Perjuangan dalam menentukan kriteria kader yang akan berkontestasi dalam pemilihan?
2. Bagaimana proses seleksi kader PDI Perjuangan untuk menjadi calon legislatif dan eksekutif?
3. Bagaimana PDI Perjuangan memastikan kader yang dipilih memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai?
4. Siapa saja yang mengambil keputusan dalam PDI Perjuangan?

C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelebagaan PDI Perjuangan.

1. Bagaimana kendala PDI perjuangan dalam melakukan pengorganisasian?
2. Bagaimana PDI Perjuangan mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses kaderisasi?
3. Bagaimana langkah-langka yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mengatasi dampak-dampak tertentu dalam pelebagaan?

4. Bagaimana faktor keuangan mempengaruhi pelebagaan partai?
5. Bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi pelebagaan PDI Perjuangan?
6. Bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi pelebagaan PDI Perjuangan?

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Foto peneliti dengan
Ketua Sekretariat DPC
PDI Perjuangan Kota
Yogyakarta pada 26 Mei
2025 di Sekretariat DPC
PDI Perjuangan Kota
Yogyakarta





Foto peneliti dengan
Sekretaris Internal dan
Bendahara DPC PDI
Perjuangan pada 26 Mei
2025 di ruang fraksi
PDI Perjuangan Kota
Yogyakarta





Foto peneliti dengan selaku Wakil Bidang Kemonikasi Politik dan juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029. Wawancara pada tanggal 2 Juni 2025.





Foto peneliti dengan
Wakil Ketua Bidang
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dalam kepengurusan
struktural DPC PDI
Perjuangan Kota
Yogyakarta dan juga
sebagai Anggota DPRD
Kota Yogyakarta periode
2024-2029. Wawancara
pada tanggal 2 Juni 2025.





Momentum idul adha
dalam rangka memperkuat
silaturahmi bersama
masyarakat dan sekaligus
memperingati bulan bung
karno pada tagal 8 juni
2025



Surat Ijin Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MIPA, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA
• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEHUMAS

• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
• PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515060, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 160/1/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Arif Soru Ibadawi
Nomor Mahasiswa : 21520010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Yogyakarta
b. Sasaran : Governing Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) dalam Mewujudkan Demokrasi
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Mei 2025


Ketua
Drs. Suloro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515089 website www.apmd.ac.id e-mail info@apmd.ac.id

Nomor : 261/I/U/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Yogyakarta
Di tempat.

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Arif Soru Ibadawi
No Mhs : 21520010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Governing Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Mewujudkan Demokrasi
Tempat : Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 6 Mei 2025
Ketua

Drs. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190





**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC - PDI PERJUANGAN)
KOTA YOGYAKARTA**

SURAT KETERANGAN

867 / Sket / DPC / VI / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Arif Soru Ibidawi
NIM : 21520010
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Universitas : STPMD APMD Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta guna memenuhi tugas Skripsi dengan judul "Governing Pelembagaan PDI Perjuangan dalam Mewujudkan Demokrasi".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan dengan semestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Juni 2025


**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA YOGYAKARTA
Masa Bhakti 2019 – 2024**

Ketua


EKO SUWANTO, ST, M.Si

Sekretaris




FX. WISNU SABDONO PUTRO, SH

Sekretariat : Jl. Balerejo No.21 Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165. Telp. (0274) 5027957